SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008, Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 43);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BalanganTahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011-2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Balangan
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Balangan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana strategis SKPD Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di Kabupaten Balangan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJP Daerah;

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RPJM Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam :

a. Penyusunan RKPD untuk setiap tahun;

b. Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

c. Penyusunan Renja SKPD untuk setiap tahun.

(2) Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk :

a. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011-2015 ke dalam prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD;

b. Menjadikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011-2015 sebagai bahan acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD;

c. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH

Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika penyusunan RPJM Daerah terdiri dari :

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
d. BAB IV Analisis isue-isue Strategis;
e. BAB V Visi, Misi dan Tujuan;
f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
i. BAB IX Indikator Kinerja
j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melaksanakan koordinasi antar instansi/SKPD guna menjamin kesesuaian isi dan substansi RPJM Daerah Tahun 2011-2015 dengan RKPD yang disusun setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daetrah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H.M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 – 2015

I. UMUM

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2011-2015 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

a. RKPD Tahun 2011;

b. RKPD Tahun 2012;

c. RPKD Tahun 2013;

d. RKPD Tahun 2014 ;dan

e. RKPD Tahun 2015.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJM Daerah, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama

serta pemangku kepentingan di Balangan.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2015. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

RPJM Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kabupaten Balangan dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam :

a. Penyusunan Renstra, RKPD, Renja,dan perencanaan penganggaran;
b. Penyusunan RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten Balangan;
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

CukupJelas .

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

CukupJelas.

Pasal 8

CukupJelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 72

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan I-5

1.4. Maksud dan Tujuan I-6

1.5. Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-8

2.1.3. Struktur dan Pola Ruang II-12

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana II-14

2.1.5. Demografi II-15

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-16

2.2.2. Kesejahteraan Sosial II-20

2.2.3. Agama II-24

2.3. Aspek Pelayanan Umum II-25

2.3.1. Pendidikan II-25

2.3.2. Kesehatan II-30

2.3.3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II-33

2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-34

2.4.1. Perhubungan II-34

2.4.2. Pos dan Telekomunikasi II-35

2.4.3. Air Minum II-36

2.4.4. Listrik II-37

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.2. Neraca Daerah III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-2
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-2
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-3
3.3. Kerangka Pendanaan III-4
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama III-4
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan III-5

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2. Isu Strategis IV-2

BAB V VISI, MISI, DAN TUJUAN

5.1. Visi V-1
5.2. Misi V-2
5.3. Tujuan V-2

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX INDIKATOR KINERJA

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi..... X-1
10.2. Kaidah Pelaksanaan..... X-1

LAMPIRAN

Matriks Indikasi Program Prioritas

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan	II-2
Tabel 2.2.	Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2006	II-6
Tabel 2.3.	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Balangan Tahun 2007	II-7
Tabel 2.4.	Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan	II-9
Tabel 2.5.	Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan	II-9
Tabel 2.6.	Data Luas Areal dan Produksi Peternakan	II-10
Tabel 2.7.	Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan	II-11
Tabel 2.8.	Kriteria Hierarki dan Kelas Interval Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan	II-12
Tabel 2.9.	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga dan penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2009	II-15
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk per Kecamatan	II-16
Tabel 2.11.	Distribusi Persentase PDRB ADHB dengan Pertambangan Tahun 2007-2009	II-17
Tabel 2.12.	PDRB per Kapita tanpa Pertambangan dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2006-2008	II-18
Tabel 2.13.	PDRB dan PDRB per Kapita tanpa Pertambangan	II-19
Tabel 2.14.	PDRB dan PDRB per Kapita dengan Pertambangan	II-19
Tabel 2.15.	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2009	II-20
Tabel 2.16.	Jumlah Penduduk, Usia, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2005-2009	II-22
Tabel 2.17.	TPAK, TKK dan TPT Menurut Jenis Kelamin	II-23
Tabel 2.18	Banyaknya Tempat Peribadatan per Kecamatan Menurut-masing Agama	II-25
Tabel 2.19.	Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005-2009	II-26
Tabel 2.20.	Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005-2009	II-26
Tabel 2.21.	Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan	II-26
Tabel 2.22.	Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan	II-30
Tabel 2.23.	Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2004-2009	II-31
Tabel 2.24.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir	II-31
Tabel 2.25.	Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan	II-31
Tabel 2.26.	Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat	II-32
Tabel 2.27.	Data Perkembangan Gizi di Kabupaten Balangan	II-32
Tabel 2.28.	Jumlah Jembatan Berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan	II-34
Tabel 2.29.	Terminal Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2009	II-35
Tabel 2.30.	Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan	II-36
Tabel 2.31.	Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran	II-36
Tabel 2.32.	Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten BalanganTahun 2003-2010	II-37
Tabel 2.33.	Banyaknya Sambungan Langgan Listrik Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2009	II-37
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009	III-2
Tabel 3.2.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Balangan Tahun 2008-2010	III-3
Tabel 3.3.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2008-2010	III-3
Tabel 3.4.	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Balangan Tahun 2008-2010	III-4
Tabel 3.5.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015	III-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan	I-6
Gambar 2.1.	Batas Administrasi Kabupaten Balangan	II-1
Gambar 2.2.	Luas masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan	II-2
Gambar 2.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Balangan	II-7
Gambar 2.4.	Struktur Ekonomi PDRB APBD Tahun 2009	II-17
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2003–2009	II-21
Gambar 2.6.	Persentase Penganggur Terbuka Menurut kategori Pengangguran Terbuka Tahun 2008	II-23
Gambar 2.7.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha	II-24
Gambar 2.8.	Rata-rata Lama Sekolah tiap Kabupaten se-Kalimantan Selatan Tahun 2009	II-28
Gambar 2.9.	Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan	II-33
Gambar 2.10.	Proporsi Panjang jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2009	II-34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

RPJMD Kabupaten Balangan 2011-2015 disusun berdasarkan visi, misi, dan agenda pembangunan serta prioritas program pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan sebagai upaya untuk mengarahkan semua

sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program–program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Balangan 2011-2015 merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.

Mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008; perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berkaitan dengan dinamika perkembangan nasional dalam perencanaan pembangunan, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Penerbitan Peraturan Bersama tersebut bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010-2014.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014, dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014;
b. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014;

c. Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan 2011-2015 selain menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 sebagai pedoman, juga diselaraskan dengan RPJMN 2010-2014. Apabila ada keselarasan dengan perencanaan yang lebih tinggi, diharapkan akan mempermudah pengembangan pembagian pembiayaan dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk program-program pembangunan yang akan dilakukan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan 2011-2015 dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
   Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
   Musrenbang RPJMD diselenggarakan oleh Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah dan masyarakat, dengan materi Rancangan Awal RPJMD.
3) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
   Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD, Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2011- 2015 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
13) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008
16) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

1.3. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan diselaraskan dengan

RPJMN 2010-2014. RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD.

Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

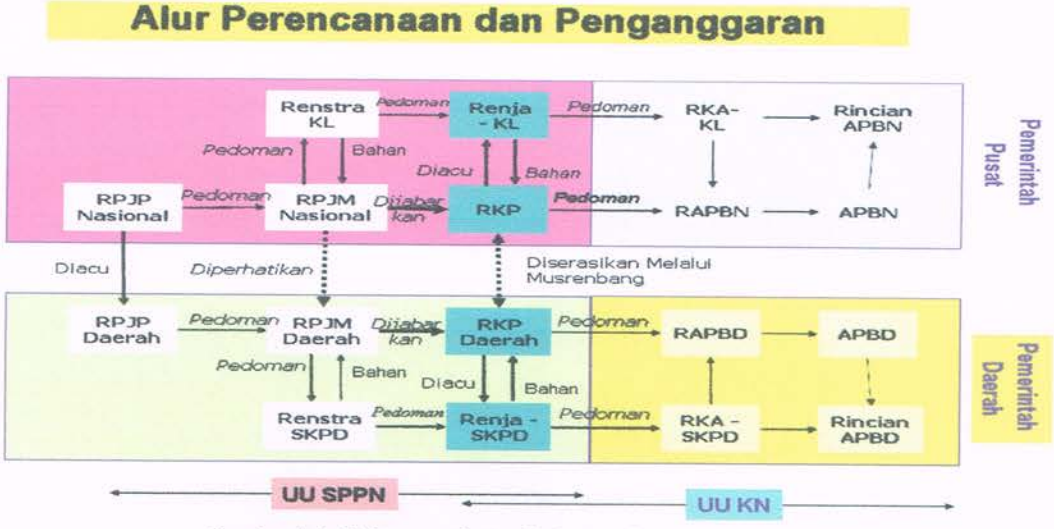

Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber

daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2011–2015 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2010-2015 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
2. Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2010-2015 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.
3. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, analisis pembiayaan dan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini mencakup identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik oleh daerah dalam periode perencanaan.

BAB V **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

Bab ini dimulai dengan perumusan visi dan kemudian diturunkan menjadi misi, tujuan, dan sasaran.

BAB VI **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) pembangunan daerah yang kemudian dituangkan dalam bentuk arah kebijakan pembangunan daerah.

BAB VII **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan program pembangunan daerah.

BAB VIII **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD dengan kebutuhan pendanaannya.

BAB IX **INDIKATOR KINERJA**

Dalam bab ini disajikan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah sebagai tolok ukur kinerja melalui pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

BAB X **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Bab ini berisi uraian mengenai pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah. Selain itu juga diuraikan mengenai kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 1.878,3 Km^2 secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur

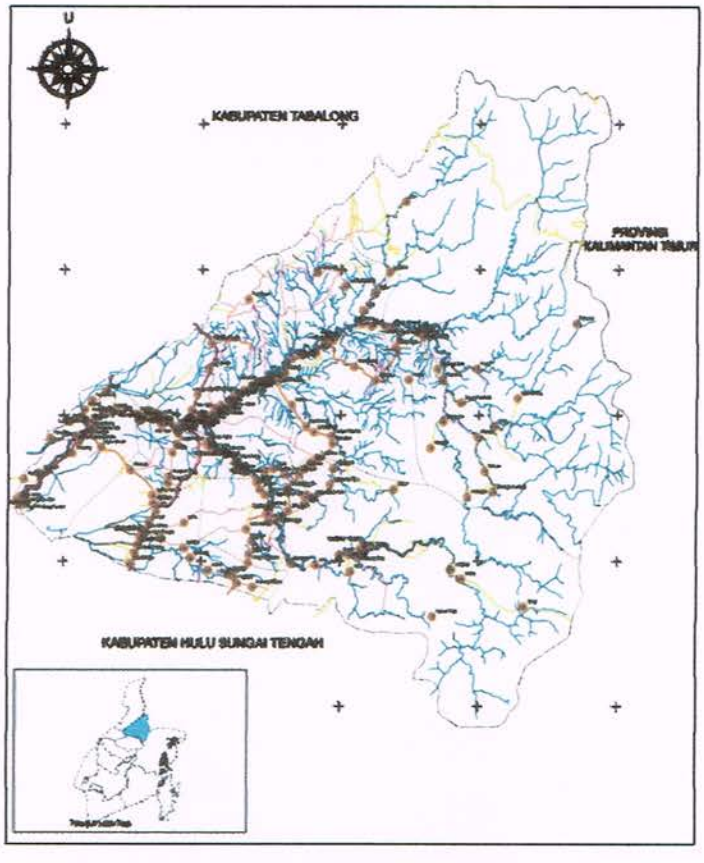

Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km² (35,15%), Kecamatan Juai 386,88 km² (20,59%), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km² (13,70%), Kecamatan Batumandi 147,96 km² (7,88%), Kecamatan Awayan 142,57 km² (7,59%), Kecamatan Paringin 100,04 km² (5,33%), Kecamatan Lampihong 96,96 km² (5,16%), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km² (4,62%). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini

Gambar 2.2. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²

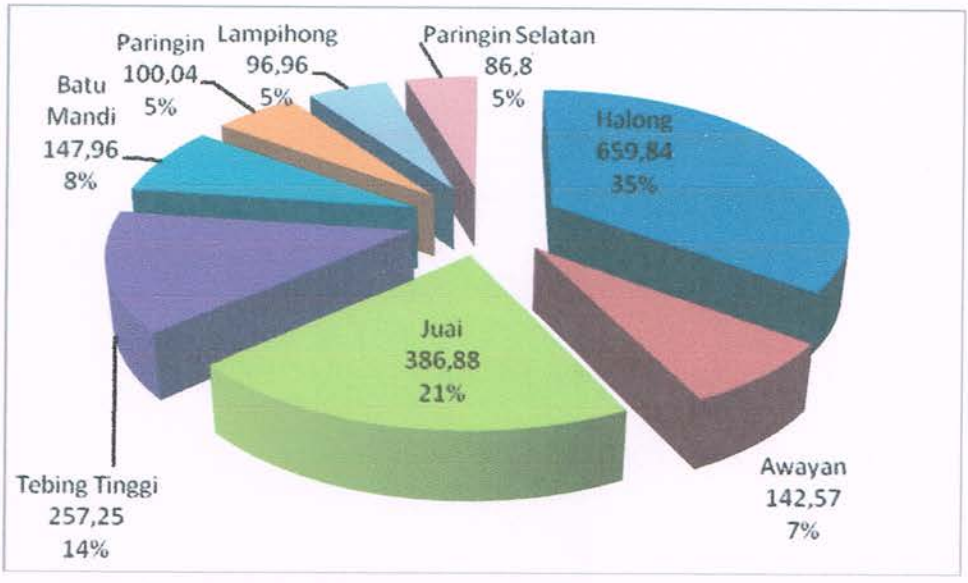

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
Lampihong	-	27
Paringin	2	14
Juai	-	21
Halong	-	21
Batu Mandi	-	18
Paringin Selatan	1	15
Awayan	-	23
Tebing Tinggi	-	10
Jumlah	3	149

Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2010

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Balangan terletak pada koordinat 2º 01'37" sampai dengan 2º 35'58" Lintang Selatan dan 114º 50'24" sampai dengan 115º 50'24" Bujur Timur.

1) Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38%). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19%. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2%, 2-8%, 8-15%,15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40%. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 % yaitu mencapai 69% dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2%, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16% dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

2) Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas.

Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25%) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44%). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64%). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76% dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98% dan 1,26% dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

3) Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah penelitian dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

a) Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25%. Pola pengaliran ini terdapat di bagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya

b) Pola Pengaliran dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25%. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian , sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

c) Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar di mana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola

Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30%. Pola pengaliran terdapat di bagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya

d) ***Pola Pengaliran Subdendritik***

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk di daerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20%. Pola pengaliran ini terdapat di bagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

4) Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamatan. Di kabupaten Balangan, rata-rata curah hujan selama tahun 2009 terlihat bervariasi. Menurut stasiun pengamatan Paringin, Batumandi dan Juai maka curah hujan rata-rata di Kabupaten Balangan sekitar 4,9 mm per hari.

Tabel.2.2.
Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2009

No	Stasiun Pengamatan	Jumlah Curah hujan (mm)	Jumlah Hari hujan	Rata-rata curah hujan/hari
1	Batu Mandi	1.841,7	120	5,0
2	Paringin	1.335,6	132	3,7
3	Juai	2.189	100	6,0
Rata-rata		1.788,8	117,3	4,9

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2010

5) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan pada areal hutan seluas 74.179,48 Ha atau 39,49%, kegiatan pada areal sawah, semak belukar, alang-alang dan tegalan seluas 77.092,66 Ha atau 41,05%, dan kegiatan pada areal perkebunan seluas 29.260,34 Ha atau 15,58%. Sisa luasan penggunaan lahan dengan sebaran sekitar 0,5 - 2,04% adalah untuk kawasan tambang, permukiman dan tempat kegiatan serta sungai, empang dan danau/situ. Dengan dominasi hutan, perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan

memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat.

Tabel 2.3.

Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Balangan Tahun 2007

No	Jenis Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Empang	84,85	0,05
2	Danau/Situ	279,52	0,15
3	Sungai	1.221,73	0,65
4	Hutan	74.179,48	39,49
5	Kawasan Tambang	3.832,33	2,04
6	Perkebunan/Kebun	29.260,34	15,58
7	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1.879,11	1,00
8	Sawah	13.308,06	7,09
9	Sawah Tadah Hujan	346,27	0,18
10	Semak Belukar Alang-Alang	38.122,50	20,30
11	Tegalan/Ladang	25.315,83	13,48
12	Jumlah	187.830,00	100,00

Sumber: Diolah dari Interprestasi Citra Satelit Tahun 2007

Gambar 2.3. Penggunaan Lahan

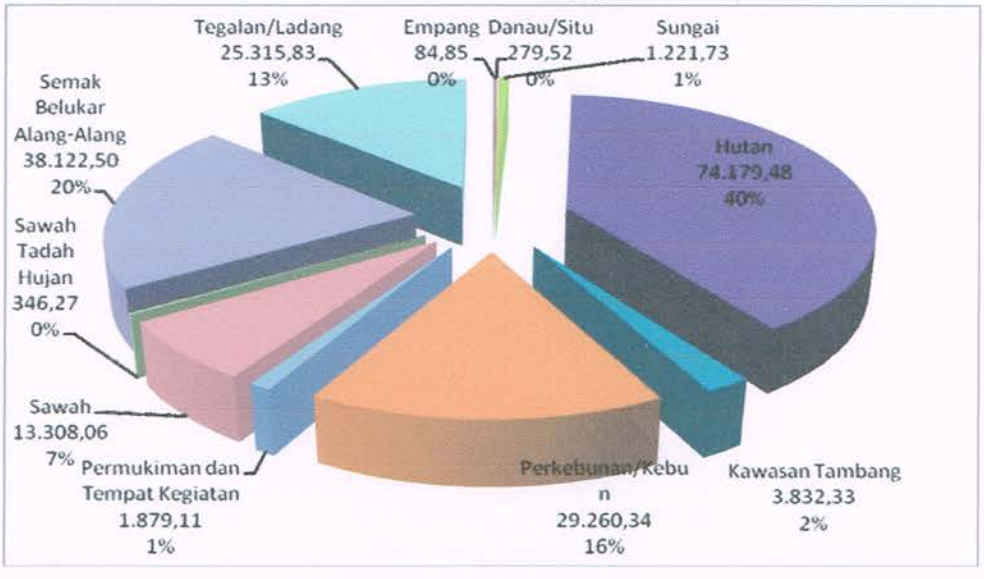

Sumber: Diolah dari Interprestasi Citra Satelit Tahun 2007

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Balangan memiliki beberapa sektor unggulan daerah yaitu di sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor pariwisata.

a. Sektor Pertanian

1) Tanaman Pangan:
   - *Padi Gogo* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan.
   - *Pisang Talas* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong & Kecamatan Awayan
2) Sayuran:
   - *Labu/Waluh* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan.
   - *Cabe Rawit* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan dan Kecamatan Halong.
3) Buah-buahan:
   - *Cempedak* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong.
   - *Maritam* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi.
4) Perkebunan:
   - *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan.
   - *Gula Aren* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
5) Peternakan:
   - *Ayam Buras* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
   - *Sapi Potong* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Untuk lebih jelasnya data mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten Balangan dari Tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan

JENIS DATA PERTANIAN	TAHUN					KET
	2005	2006	2007	2008	2009	
a. Padi						
- Luas areal produksi	28,073	26,624	27,674	29,648	30,912	Ha
- Jumlah produksi	97,750	92,747	100,834	110,122	121,516	Ton
- Produksi beras	39,908	63,538	85,977	98,910	112,646	Ton
- Jumlah konsumsi	13,756	13,570	13,993	14.975	-	Ton
b. Jagung						
- Luas areal produksi	266	229	241	407	500	Ha
- Jumlah produksi	446	445	523	688	875	Ton
- Jumlah konsumsi	154	134	134	157	-	Ton
c. Kedelai						
- Luas areal produksi	210	171	25	27	958	Ha
- Jumlah produksi	385	205	383	41	636	Ton
- Jumlah konsumsi	110	116	62	115	-	Ton
d. Singkong dan umbi-umbian						
- Luas areal produksi	292	206	183	181	330	Ha
- Jumlah produksi	3,052	1,787	2,802	2,521	4,265	Ton
- Jumlah konsumsi	878	916	536	841	-	Ton

Sumber: Distanakan

Tabel 2.5. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan

JENIS DATA PERKEBUNAN	TAHUN					KET
	2005	2006	2007	2008	2009	
a. Karet						
- Luas areal	-	30,591	31,806	33,007	33,795	Ha
- Jumlah produksi	-	24.341	24.034	26.472	27.957	Ton
b. Kelapa						
- Luas areal	-	-	-	-	729	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	749,70	387,35	Ton
c. Kopi						
- Luas areal	-	1,162	1,162	1,162	482	Ha
- Jumlah produksi	-	399	378	372	5,98	Ton
d. Sawit						
- Luas areal	-	23	224	322	338	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	-	564	Ton
e. Kapuk						
- Luas areal	-	-	-	-	20	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	3,40	0,182	Ton
f. Kemiri						
- Luas areal	-	-	-	-	412	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	478,30	160,55	Ton
g. Lada						
- Luas areal	-	24	18	18	10	Ha
- Jumlah produksi	-	5,1	4,5	4,5	0,162	Ton
h. Pinang						
- Luas areal	-	-	-	-	40	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	44,30	4,50	Ton
i. Aren/enau						
- Luas areal	-	-	-	-	529	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	313,50	298,20	Ton
j. Jahe						
- Luas areal	-	-	-	-	-	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	7.00	-	Ton
k. Sagu						
- Luas areal	-	-	-	-	297	Ha
- Jumlah produksi	-	-	-	440,60	217,60	Ton

Sumber: Distanakan

Tabel 2.6. Data Luas Areal dan Produksi Peternakan

JENIS DATA PETERNAKAN	TAHUN					KET
	2005	2006	2007	2008	2009	
a. Ternak sapi potong						
- jumlah populasi	4,022	4,405	4,967	5,182	5,811	Ekor
- jumlah produksi (daging)	-	-	-	129.118	124.163	Ton
- jumlah pemotongan / th	556	756	1,156	711	620	Ekor
- jumlah pertumbuhan populasi per tahun	9,23	9,13	12,76	10,49	0,34	%
- harga produsen (kg bh)	-	-	-	21.000	70.500	Rp.
- harga konsumen (kg)	-	-	-	22.500	75.000	Rp.
b. Ternak kecil						
- jumlah populasi kambing	2,525	2,800	3,645	3,731	4.003	Ekor
♣ jumlah produksi (daging)	-	-	-	7.435	5.425	Kg
♣ harga produsen (kg bh)	-	-	-	24.000	30.000	Rp.
♣ harga konsumen (kg)	-	-	-	25.000	45.000	Rp.
- jumlah populasi domba	45	46	56	56	42	Ekor
♣ jumlah produksi (daging)	-	-	-	1.025	3.322	Kg
♣ harga produsen (kg bh)	-	-	-	22.500	30.000	Rp.
♣ harga konsumen (kg)	-	-	-	24.000	45.000	Rp.

Sumber : Distanakan

JENIS DATA PETERNAKAN	TAHUN					KET
	2005	2006	2007	2008	2009	
c. Unggas						
- ayam buras						
♣Jumlah populasi	197,156	201,430	263,770	266,800	407.169	Ekor
♣ jumlah produksi (daging)	-	-	-	110.145	168.912	Ton
♣jumlah produksi (telur)	-	-	-	233.041	185.672	Btr/th
♣harga produsen (kg bh)	-	-	-	20.000	27.500	Rp.
♣harga konsumen (kg)	-	-	-	22.500	35.000	Rp.
- ayam pedaging						
♣Jumlah populasi	58,814	121,550	155,355	245,115	303.290	Ek/th
♣ jumlah produksi (daging)	-	-	-	-	241,294	Kg
♣harga produsen (kg bh)	-	-	-	-	26.000	Rp.
♣harga konsumen (kg)	-	-	-	-	30.000	Rp.
- Itik						
♣Jumlah populasi	58,814	63,101	65,219	70,199	70.369	Ek/th
♣ jumlah produksi (daging)	-	-	-	110.145	37.467	Ton
♣Jumlah produksi (telur)	413,413	435,737	392,728	471,273	541,859	Btr/th
♣harga produsen (kg bh)	-	-	-	22.500	30.000	Rp.
♣harga konsumen (kg)	-	-	-	25.000	45.000	Rp.
d. Industri peternakan						
- jumlah perusahaan pembibitan ayam	-	-	-	-	-	
- jumlah perusahaan pengemukan sapi potong	-	-	-	-	-	
- jumlah pabrik makanan ternak	-	-	-	-	-	
- jumlah industri pengolahan susu (IPS)	-	-	-	-	-	
e. jumlah koperasi peternakan	-	-	-	-	-	
f. jumlah rumah potong hewan (RPH)	-	-	-	-	1	Bh

Sumber Distanakan

Tabel 2.7. Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan

JENIS DATA KEHUTANAN	TAHUN					KET
	2005	2006	2007	2008	2009	
a. Hasil hutan non HPH						
- Kayu bulat	-	10,005.36	9,281.36	254.09	1,494.97	M^3
- Kayu gergajian	-	257.9939	1.102,7828	7.107.577	349.74	M^3
- Kayu olahan	-	7.365,5742	5.340,7638	-	-	M^3
- Hasil hutan ikutan						
Rotan	-	-	-	-	-	
Gondorukem	-	-	-	-	-	
Terpentin	-	-	-	-	-	
Damar	-	-	-	-	-	
Kayu putih	-	-	-	-	-	
b. Luas lahan kritis	-	-	36,215	36.215	43,732.5	Ha
c. Luas lahan reboisasi	350	400	-	-	30,383.5	Ha
d. Luas lahan penghijauan	175	10	-	-	13,349	Ha
e. Luas kebakaran hutan	-	-	-	-	7	Titik hotspot
f. Industri pengolahan hasil hutan	-	-	-	1	2	Bh

Sumber: Dishutbun LH

b. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan, sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu:

1) Kecamatan Paringin.

   Kecamatan ini memiliki potensi batu bara dengan Kalori di atas 6000 cal = 77.680.000 Ton

2) Kecamatan Halong

   Kecamatan Halong memiliki potensi batu bara dengan Kalori di atas 6000 cal = 52.650 Ton dan 5000 – 6000 cal = 117.194 Ton.

3) Kecamatan Awayan

   Batu bara dengan kalori di atas 6000 cal = 2.340 Ton dan 4800 – 6000 cal = 17.899 Ton.

4) Kecamatan Juai

   Batu bara dengan kalori 4800 – 6000 cal = 11.083.637,5 Ton.

5) Kecamatan Batumandi

   Batu bara dengan kalori 4800 – 6000 cal = 9.607.260 Ton

c. Sektor Pariwisata

Di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu :

1) Kecamatan Awayan

- Benteng Tundakan

2) Kecamatan Paringin Selatan
   - Danau Baruh Bahinu Dalam, dimana lokasi objek wisata ini pernah ditayangkan melalui acara Jejak Petulangan yang dilaksanakan oleh Trans TV.
3) Kecamatan Halong
   - Air Terjun Manyandar
   - Goa Berangin Gunung Belawan
4) Kecamatan Juai
   - Makam Datu Kandang Haji

     Objek Wisata ini merupakan Objek Wisata Religius, dimana Datu Kandang Haji merupakan tokoh penyebar Agama Islam di Kabupaten Balangan
5) Kecamatan Tebing Tinggi
   - Gunung Hantanung Permai

2.1.3. Struktur dan Pola Ruang

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur tata ruang di Kabupaten Balangan, direncanakan dalam rangka mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang, keserasian pengembangan ruang, dan keefektifan sistem pelayanan. Adapun Rencana Penentuan Hirarki pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut .

Tabel 2.8 Kriteria Hirarki dan Kelas Interval Sistem Pusat – Pusat Pelayanan/Kegiatan

No	Kelas Interval	Hirarki	Indeks Sentralitas
1	7 – 9	I	Kosentrasi penduduk tinggi, aksesibilitas tinggi, fasilitas lengkap dan tingkat pelayanan tinggi (sangat memadai)
2	4 – 6	II	Kosentrasi penduduk sedang, aksesinilitas sedang, fasilitas agak lengkap dan tingkat pelayanan sedang (memadai)
3	0 – 3	III	Kosentrasi penduduk rendah, aksesibilitas rendah, fasilitas kurang lengkap dan tingkat pelayanan rendah (kurang memadai)

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2008

Untuk mendukung struktur tata ruang yang akan direncanakan, wilayah pelayanan Kabupaten Balangan dibagi dalam 3 (tiga) pusat pelayanan yang relatif mempunyai kesamaan secara geografis, yaitu:

1) Pusat Pelayanan I/ Primer/ Hirarki Kota Orde I), merupakan wilayah dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Paringin sebagai PKL, Paringin Selatan dengan arah kegiatan pengembangan adalah jasa pemerintahan, jasa perdagangan, distribusi regional, dan pariwisata serta merupakan pusat pengembangan wilayah tengah Kabupaten Balangan.
2) Pusat Pelayanan II / sekunder/ Hirarki Kota Orde II), merupakan wilayah dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Halong (pusat PKL–1 Wilayah Timur), dan Kecamatan Tebing Tinggi dengan arah pengembangan sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, pariwisata dan kawasan lindung serta merupakan pusat pengembangan wilayah Timur Kabupaten Balangan.
3) Pusat Pelayanan III/ tersier/ Hirarki Kota Orde III), merupakan wilayah dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Batumandi (pusat PKL-1 Wilayah Selatan), dengan pendukung Kecamatan Awayan dan Kecamatan Lampihong, dimana arah pengembangan sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan dan industri serta merupakan pusat pengembangan wilayah Selatan Kabupaten Balangan.

b. Rencana Pola Ruang

Dalam Arahan Pola Ruang Wilayah terdapat 2 kelompok kawasan yang akan ditetapkan dalam rencana yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

1) *Rencana Kawasan Lindung*

Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha.

Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44% dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 %); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9

%); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 %); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 %); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 %); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 %); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 %); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 %).

2) Rencana Kawasan Budidaya

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 %, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 %); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 %); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 %); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 %); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 %); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 %); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 %) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 %).

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40% dan lebih dari 40% dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan.

Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir.

Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sendimentasi.

2.1.5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2010 sebesar 112.395 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 106.321 jiwa, yang terdiri dari 29.334 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km^2 ini memiliki kepadatan penduduk *(population density)* 60 jiwa per km^2. Dari total penduduk yang ada, sebanyak 56.424 laki-laki dan 55.971 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 18.621 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 5.931 jiwa, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9. dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9.
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2009

Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah/total		
		Desa/Kel.	Rumah tangga	Penduduk
1. Lampihong	96,96	27	4.329	15.230
2. Batumandi	147,96	18	4.686	14.528
3. Awayan	142,57	23	3.506	11.674
4. Tebing Tinggi	257,25	16	1.872	5.688
5. Paringin	100,04	21	4.853	15.400
6. Paringin Selatan	86,80	21	3.249	10.639
7. Juai	386,88	16	4.440	15.342
8. Halong	659,84	10	4.652	17.820
Jumlah	**1.878,30**	**152**	**31.587**	**106.321**

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2009 s.d. 2010

Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	Laki-laki		Perempuan					
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1. Lampihong	7.494	7.807	7.736	7.916	15.230	15.723	97	99
2. Batumandi	7.253	8.137	7.275	7.959	14.528	16.096	100	102
3. Awayan	5.761	5.936	5.913	6.116	11.674	12.052	97	97
4. Tebing Tinggi	2.835	3.001	2.853	2.930	5.688	5.931	99	102
5. Paringin	7.609	8.478	7.791	8.369	15.400	16.847	98	101
6. Paringin Selatan	5.252	5.733	5.387	5.699	10.639	11.432	97	101
6. Juai	7.897	7.893	7.445	7.800	15.342	15.693	106	101
7. Halong	8.890	9.439	8.930	9.182	17.820	18.621	100	103
Jumlah	**52.991**	**56.424**	**53.330**	**55.971**	**106.321**	**112.395**	**99**	**101**

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2010 dan Hasil Sensus Penduduk 2010

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah.

Berdasarkan tabel terlihat bahwa perekonomian Balangan masih didominasi oleh sektor primer dengan kontribusi hampir 84 persen (pertanian 1,17 persen dan pertambangan 62,62 persen), sektor tersier dengan kontribusi sekitar 13 persen, sedangkan sektor sekunder hanya memberikan kontribusi kurang dari 3 persen. Dalam tiga tahun terakhir struktur perekonomian balangan masih menunjukkan pola yang sama. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier tampaknya belum terlihat secara nyata.

Tabel 2.11. Distribusi Persentase PDRB ADHB dengan Pertambangan Tahun 2007-2009

No	Sektor	2007	2008*)	2009**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian	21,27	20,86	21,18
2.	Pertambangan & Penggalian	64,46	63,38	62,64
3.	Industri Pengolahan	0,27	0,28	0,29
4.	Listrik & Air Bersih	0,10	0,13	0,14
5.	Bangunan	1,90	1,87	2,00
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	4,07	4,27	4,06
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2,71	2,74	2,78
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,96	1,11	1,20
9.	Jasa-jasa	4,26	5,35	5,72
	Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Regional Income of Balangan 2007-2009

Namun berkurangnya sedikit demi sedikit kontribusi sektor pertambangan tiap tahunnya memperlihatkan bahwa dengan sangat perlahan terjadi peningkatan peranan sektor lain terhadap total PBRD. Hal ini sangat baik, mengingat kedua sektor ini walaupun memiliki keunggulan komparatif, tapi belum memiliki keunggulan kompetitif. Sementara sektor sekunder memiliki keunggulan kompetitif. Berbeda dengan keunggulan komperatif, keunggulan kompetitif akan terus berubah karena bersifat dinamis; teknologi berubah terus, demikian juga kualitas SDM semakin berkembang, sehingga pengembangan sektor ini dapat dilaksanakan dan sangat tergantung pada kapasitas masyarakat (terutama pengusaha) untuk berinovasi dan melakukan perubahan terus menerus.

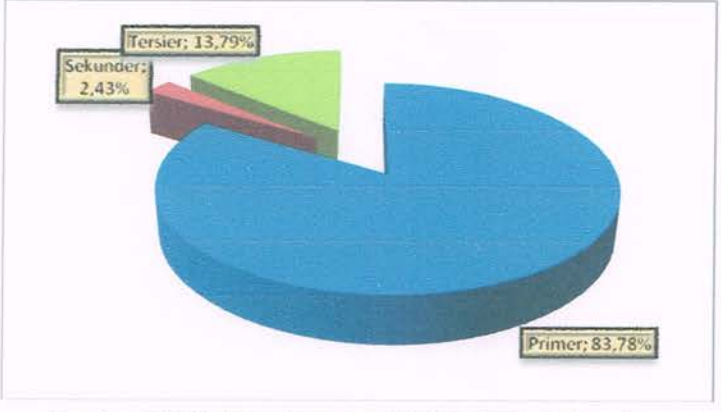

Gambar 2.4 Struktur Ekonomi PDRB APBD Tahun 2009

b. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, meskipun ukuran ini belum mencakup kesenjangan antar penduduknya. Angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kedua indikator ini (PDRB dan jumlah penduduk) saling berkaitan erat satu sama lain, sehingga laju pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka PDRB per kapita akan semakin kecil.

Tabel 2.12. PDRB Per Kapita tanpa Pertambangan dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2006-2008

Rincian	2006	2007*)	2008**)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Atas Dasar Harga Berlaku			
1. PDRB Perkapita Rp	6 601 854	7321 504	8 333 096
2. Indeks Perkembangan (2000=100)	194,34	215,53	245,30
3. Laju Pertumbuhan (%)	11,37	10,90	13,81
II. Atas Dasar Harga Konstan 2000			
1. PDRB Perkapita Rp	4 369 970	4 564 495	4 874 535
2. Indeks Perkembangan (2000=100)	129,10	134,85	144,01
3. Laju Pertumbuhan (%)	5,59	4,45	6,79

Sumber: Regional Income of Balangan 2007-2009

Tabel 2.12. memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Balangan yang dilihat atas dasar Harga Berlaku selama tahun 2009 sebesar Rp. 8,3 juta per tahun, dimana jika diambil rata-rata per bulan mencapai Rp. 694.424,-. Angka tersebut adalah angka PDRB per kapita yang tidak memperhitungkan sub sektor minyak bumi dan pertambangan. Jika memperhitungkan kedua sub sektor tersebut, maka angka PDRB per kapita ADHB yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.852.656,- per bulan.

PDRB. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 64,30 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah sektor listrik dan air bersih yang hanya memberikan kontribusi sebanyak 0,10 persen saja.

Tabel 2.15.
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2007 – 2009

Sektor	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
1. Pertanian	4,23	4,36	5,83	2,40	7,13
2. Pertambangan dan Penggalian	4,56	2,55	4,05	5,07	5,01
3. Industri Pengolahan	0,63	10,33	13,71	6,50	4,60
4. Listrik dan Air Bersih	8,51	3,22	11,46	12,21	6,20
5. Bangunan	8,45	10,74	30,10	6,75	6,75
6. Perdagangan, hotel & restaurant	5,83	7,58	12,05	8,15	5,68
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,79	5,37	4,05	5,06	6,10
8. Bank dan Lembaga Keuangan	10,42	(-5,82)	7,43	13,86	9,28
lainnya	2,53	2,32	6,93	14,12	7,78
9. Jasa-jasa					
PDRB tanpa Minyak Bumi dan Pertambangan	4,57	4,46	7,59	5,09	7,02
PDRB dengan Minyak Bumi dan Pertambangan	4,55	4,30	5,25	5,07	5,72

*Ket : *) Angka Diperbaiki **) Angka sementara*

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2010

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

a) Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2003–2008

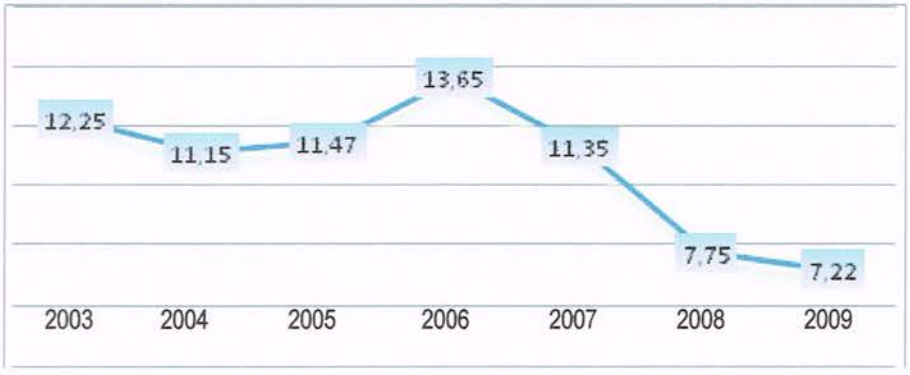

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2009

Berdasarkan Gambar 2.5 terlihat bahwa angka kemiskinan menunjukkan trend menurun, kenaikan angka kemiskinan cukup signifikan terjadi pada tahun 2006, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan BBM yang terjadi pada tahun sebelumnya yang efeknya masih terasa di tahun berikutnya. Namun setelah tahun 2006, trend angka kemiskinan menurun dari 13,65 persen pada tahun 2006 menjadi 11,35 persen pada tahun 2007 dan tahun berikutnya hanya 7,75 persen. Capaian ini merupakan hasil upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan antara lain: Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS),Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Bantuan Alat dan mesin serta sarana produksi pertanian/perkebunan dan lain-lain.

Jika dilihat berdasarkan KK maka, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Balangan tahun 2008 mencapai 7.812 jiwa atau sekitar 7,75 % dari total jumlah penduduk. Tahun 2009, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 7.316 jiwa atau sekitar 7,22%. Akibat miskin, sebagian masyarakat masih belum mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya (pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha, perumahan, air bersih dan lain-lain). Untuk mengurangi permasalahan ini akan diupayakan antara lain melalui penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar baik air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan, listrik, komunikasi dan transportasi.

b) Angkatan Kerja dan Produktivitas

Pada tahun 2009 penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas), berjumlah 68.972 orang atau 65,79 persen. Jumlah ini menunjukan komersen posisi yang cukup baik, dimana dengan persentase 65,79 persen tersebut akan mampu untuk menjamin 34,21 persen penduduk yang tidak/belum produktif. Jelasnya data mengenai ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Jumlah Penduduk, Usia, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Balangan tahun 2005-2009

NO	DATA KETENAGAKERJAAN	TAHUN					KET.
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Jumlah Penduduk						orang
	a. Laki-laki	49.564	50.056	50.708	50.958	52.991	orang
	b. Perempuan	50.445	50.900	51.484	51.744	53.330	orang
2	Usia						
	a. 0-14 tahun	31.759	30.758	30.070	30.070	29.214	orang
	b. 15-64 tahun	64.824	66.285	67.658	67.658	68.972	orang
	c. > 65 tahun	3.426	3.913	4.471	4.471	6.638	orang
3	Kepadatan Penduduk						
	- Rata-rata	54	54	54	55	57	%
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	5	-	7	-	%

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2009

Perkembangan ketenagakerjaan dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Pada tahun 2009 dari seluruh penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas), jumlah penduduk yang sudah aktif dalam perekonomian (angkatan kerja) adalah 75,25 persen dari penduduk usia kerja. Persentase tersebut merupakan ukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang menunjukkan bahwa *supply* tenaga kerja di pasar tenaga kerja Kabupaten Balangan cukup besar sehingga harus diimbangi dengan *demand* tenaga kerja yang besar pula agar angka pengangguran dapat lebih ditekan. Total angkatan kerja di Kabupaten Balangan, sebanyak 96,92 persen berstatus bekerja. Jika dilihat dari jenis kelaminnya maka TPAK lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan untuk TKK terjadi penurunan dari 97,55 persen menjadi 96,92% pada tahun 2009. Artinya sebanyak 96,92 persen dari angkatan kerja telah terserap dalam lapangan kerja.

Tabel 2.17.
TPAK, TKK dan TPT Menurut Jenis Kelamin

Indikator Naker	2008			2009		
	L	P	L+P	L	P	L+P
TPAK	88,87	68,89	79,26	85,73	63,95	75,25
TKK	97,14	98,14	97,55	96,42	96,90	96,92
TPT	2,86	1,86	2,45	3,58	3,10	3,38

Sumber: BPS Kab. Balangan, Sakernas 2009

Gambar 2.6. Persentase Penganggur Terbuka Menurut Kategori Pengangguran Terbuka, Tahun 2008

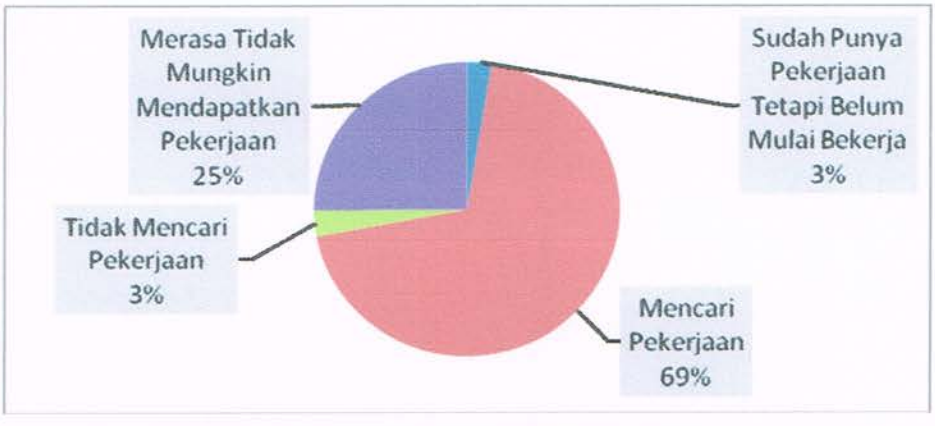

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan, 2008

Jika dilihat dari Gambar 2.6. di atas bahwa sebanyak 25 persen angkatan kerja merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sehingga menyebabkan mereka menjadi pengangguran, dan sebanyak 3 persen sudah punya pekerjaan tapi belum bekerja dan sisanya adalah masih mencari pekerjaan. Jika dilihat pengangguran menurut pendidikan, hampir separuhnya berpendidikan SMA/sederajat yaitu 49,57 persen, kemudian diploma/sarjana sebanyak 25.31 persen dan paling sedikit tidak berpendidikan/tidak sekolah sebanyak 5,08 persen. Jika dilihat dari penduduk yang bekerja menurut sektor lapangan usahanya maka lebih dari separuhnya adalah bekerja di sektor primer (sektor pertanian yang meliputi subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan).

Gambar 2.7. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha

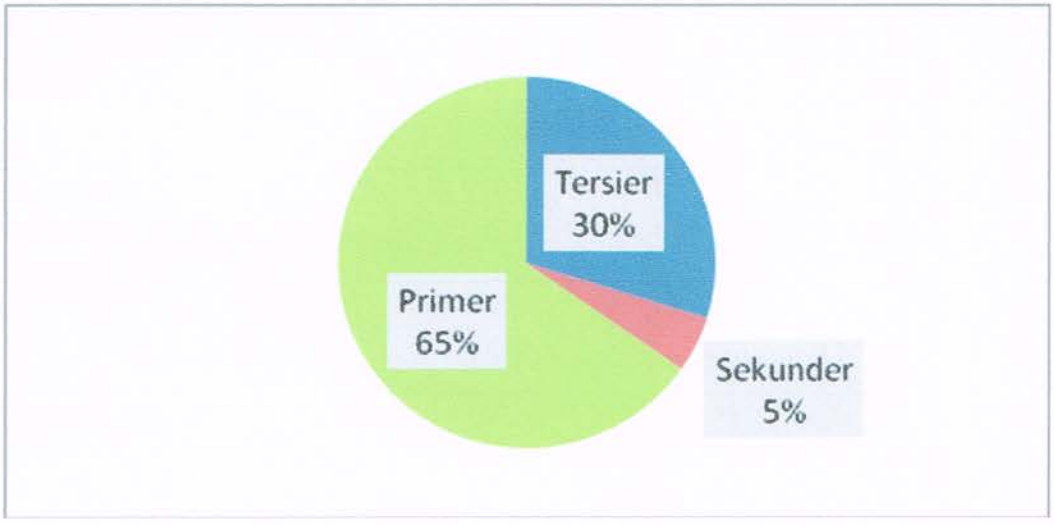

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan, 2008

2.2.3. Agama

Agama dan sosial budaya menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam mendukung pelaksanaan pembangunan fisik/material. Setiap individu, keluarga dan masyarakat bebas mengekspresikan kehidupan beragamanya ataupun kepercayaannya. Sebagai makhluk sosial warga masyarakat bebas untuk berserikat atau berkumpul. Hal ini sudah dijamin oleh undang-undang.

Dilihat dari Tabel 2.18. menunjukkan bahwa sebagian besar tempat peribadatan berupa langgar/mushola dan masjid masing-masing berjumlah 291 buah dan 121 buah, kemudian Balai adat (15 buah) dan gereja (5 buah). Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas penduduk beragama islam, dengan adanya tempat peribadatan diharapkan dapat meningkatkan iman dan taqwa sehingga bisa mencegah tindak pidana maupun penyakit masyarakat lainnya seperti: korupsi, kriminal, perjudian, perilaku asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, dan lain-lain.

Tabel 2.18.
Banyaknya Tempat Peribadatan per Kecamatan Menurut Masing-Masing Agama di Kabupaten Balangan Tahun 2009

No.	Kecamatan	Tempat Ibadah					
		Masjid	Langgar/ Mushola	Gereja	Pura	Vihara	Balai Adat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Paringin	17	37	-	-	-	-
2.	Lampihong	13	28	-	-	-	-
3.	Batumandi	17	59	-	-	-	-
4.	Awayan	19	40		-	-	-
5.	Juai	18	34	-	-	-	-
6.	Halong	20	44	4	1	4	-
7.	Tebing Tinggi	6	13	-	-	-	15
8.	Paringin Selatan	11	36	-	-	-	-
	Jumlah	121	291	4	1	4	15

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2010

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum.

a. Perkembangan Sarana Pendidikan

Jika dilihat pada tabel 2.19. perkembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitas meningkat dalam kurun waktu tahun 2005-2009. Untuk Taman Kanak-kanak dari 49 buah pada tahun 2005 meningkat menjadi 63 buah pada tahun 2009, Sekolah Dasar 159 buah pada tahun 2005 menjadi 160 buah tahun 2009, Kondisi peningkatan ini diikuti untuk jenjang pendidikan SLTP dan SMU.

Tabel 2.19.
Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005-2009
Tahun (buah)

Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
TK	49	50	54	63	66
SD	159	159	159	160	160
SLTP	11	14	14	21	22
SMU	5	8	7	9	9

Sumber : BPS Balangan Dalam Angka 2010

Peningkatan jumlah sarana pendidikan berbanding lurus dengan murid yang ada di semua jenjang pendidikan. Jumlah murid yang paling banyak terdapat di jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu 14,297 orang sedangkan yang paling sedikit adalah di jenjang pendidikan SMU sebanyak 1,725 orang pada tahun 2009.

Tabel 2.20.
Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005-2009

Jenjang	Tahun (buah)					Rasio
	2005	2006	2007	2008	2009	
TK	1,408	1,669	1,534	1,702	1,777	12.62
SD	13,086	13,679	13,782	13,684	14,297	10.93
SLTP	1,858	1,889	1,797	2,167	2,263	12.18
SMU	966	1,038	1,268	1,651	1,725	17.86

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan 2009

Tabel 2.21.
Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru
Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Murid-Kelas	Rasio Murid-Guru
Taman Kanan-Kanan (TK)	28,48	13,59	10,74
SD / Sederajat	89,70	13,24	9,00
SLTP / Sederajat	138,09	29,52	9,47
SMP Terbuka	28,48	13,59	2,48
SMU / Sederajat	177,20	30,91	9,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan 2009

Jika dilihat berdasarkan rasionya, untuk rasio murid–sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, terbanyak adalah SMU/Sederajat yaitu 1:177,20 artinya 1 sekolah terdapat 177 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di Taman Kanak-Kanak dan SMP terbuka masing-masing 1:28,48 (1 sekolah menampung 28 murid).

Sedangkan untuk rasio murid-kelas menunjukkan bahwa SMU/Sederajat 1:30,91, kemudian, SLTP/sederajat 1:29,52; taman kanak-kanak dan SMP Terbuka masing-masing 1:13,59. Rasio paling sedikit adalah terdapat di SD/sederajat yaitu 1:13,24. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sedangkan rasio murid - guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar, terbanyak adalah Taman Kanak-kanak (TK) yaitu 1: 10,74 (1 guru mengajar 10 murid) sedangkan rasio paling sedikit adalah SMP terbuka yaitu 1:2,48.

b. Indeks Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada tahun 2009, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 94,91 persen. Tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,90 persen. Dari sekitar 71,5 persen penduduk Balangan yang berusia 15 tahun ke atas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hanya 5,09 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf.

Angka melek huruf Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2009, pencapaian angka melek huruf provinsi Kalimantan Selatan adalah 95,41 persen. Angka melek huruf terendah adalah Kabupaten Barito Kuala dengan 92,19 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan 97,94 persen, yang disusul oleh Kota Banjarbaru dengan 97,75 persen. Dapat dimaklumi bahwa pada kedua kota ini tingkat melek hurufnya sangat tinggi dikarenakan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap dan memadai.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk suatu daerah di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalaninya. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

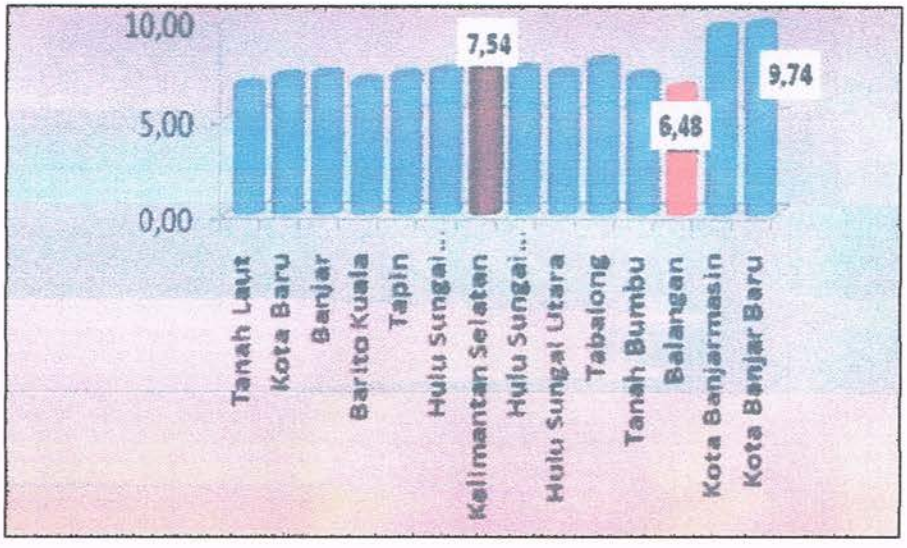

Gambar 2.8. Rata-rata Lama Sekolah Tiap Kabupaten se Kalimantan Selatan tahun 2009

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2009 sebesar 6,48 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan baru mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SD atau belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Sama kondisinya dengan capaian angka harapan hidup dan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 7,54 tahun, bahkan angka rata-rata lama sekolah balangan merupakan yang terendah se-provinsi Kalimantann Selatan. Melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di Kabupaten Balangan perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama di era otonomi sekarang ini.

c. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat

menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan kabupaten Balangan terdiri dari: angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, Nilai rerata UN, Angka mengulang, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan.

Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Dari data yang ada, nilai APK pada jenjang sekolah dasar, SLTP, dan SLTA pada tahun 2008 dibawah seratus. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian dari anak berusia 7-12 tahun, 13-15 tahun , dan 16-18 tahun sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan mereka tidak sekolah lagi.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut teori, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Di Kabupaten Balangan capaian APM tahun 2008 untuk SD sebesar 64,5 persen, berarti selisih dengan APK sebesar 19,2 persen artinya bahwa diantara murid SD sebanyak 19,2 persennya berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun, sedangkan untuk APM SMP sebesar 59,5 persen ada selisih 22,6 persen terhadap APK, dan APM-nya SMU sebesar 43,2 persen

Tabel 2.22.
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan
Kabupaten Balangan

No	Indikator	Tahun 2006			Tahun 2007			Tahun 2008		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
1	Angka Partisipasi Kasar/APK (%)	79,7	63,3	24,9	82,3	74,8	53,3	83,7	82,1	54,1
2	Angka Partisipasi Murni/APM (%)	62,8	45	24,9	63,8	59,5	36,1	64,5	59,5	43,2
3	Nilai rerata UN	-	4,8	4,5	-	7,0	6,9	5,64	6,79	6,03
4	Angka mengulang (%)	10,1	1,4	2,9	8,0	0,01	4,2	8,1	0,9	0,8
5	Angka putus sekolah (%)	0,5	0,9	-	0,3	0,2	-	0,3	0,9	1,4
6	Angka kelulusan (%)	100	35,46	27,54	98,2	98,36	87,25	98,20	96,32	86,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan

Berdasarkan Tabel 2.22 terlihat nilai rerata Ujian Nasional (UN) di seluruh jenjang pendidikan rata-rata di atas angka lima, dengan perkembangan yang stagnan. Angka mengulang tertinggi pada tahun 2008 terdapat di SD sedangkan yang paling kecil adalah SLTA, sedangkan angka putus sekolah tertinggi SLTA yaitu sebesar 1,4 persen sedangkan terendah adalah SD sebesar 0,3 persen. Dari data yang ada, sebagian besar indikator menunjukkan trend meningkat, namun tidak demikian dengan indikator angka kelulusan SLTA pada tahun 2008, dimana terjadi penurunan dari 87,25 persen pada tahun 2007 menjadi 86,18 persen pada tahun 2008.

2.3.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel 2.23. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2009 berjumlah 247 tenaga kesehatan, yang terdiri dari 28 dokter, 114 perawat, dan 105 bidan, jumlah ini terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.23.
Perkembangan Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Balangan Tahun 2004-2009
(Orang)

Tenaga Kesehatan	2005	2006	2007	2008	2009
Dokter	15	24	24	23	28
Perawat	52	70	70	107	114
Bidan	81	98	98	103	105
Jumlah	148	192	192	233	247

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan

Berdasarkan penolong kelahiran pertama bayi pada tahun 2008 mayoritas penduduk menggunakan jasa dukun bersalin sebagai penolong kelahiran yaitu sebesar 68,82 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakmampuan masyarakat untuk membayar jasa tenaga terdidik, kemudian tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa bidan yaitu sebesar 28,02 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24.
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir
Tahun 2008

Penolong Kelahiran	Kelahiran	
	Pertama	Terakhir
Dokter	1,36	3,17
Bidan	28,02	49,36
Tenaga Medis Lain	0,90	2,25
Dukun Bersalin	68,82	43,43
Famili/Keluarga	0,90	1,79
Total	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Susenas 2008

Tabel 2.25.
Perkembangan Sarana Kesehatan
di Kabupaten Balangan Tahun 2004-2009
(buah)

Fasilitas Kesehatan	2005	2006	2007	2008	2009
Rumah Sakit	-	-	-	1	1
Puskesmas	9	9	9	10	10
Pustu	26	26	26	27	27
Polindes	105	62	62	49	49
Poskesdes	-	-	10	10	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan

Untuk fasilitas kesehatan pada saat ini di setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada Tahun 2008 telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan yang telah didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Balangan khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Balangan pada umumnya. Jumlah fasilitas pada tahun 2009 terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2008, peningkatan ini terdapat pada Poskesdes dari 10 buah menjadi 15 buah.

Namun penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, ternyata belum meningkatkan rata-rata usia harapan hidup dan menurunkan jumlah kematian baik ibu maupun bayi. Penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS DATA DEMOGRAFI	TAHUN					KET.
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Jumlah Kematian Bayi	11	14	17	20	36	orang
2	Jumlah Kematian Ibu	0	2	2	2	6	orang
3	Rata-rata Usia Harapan Hidup	-	63,70	61,15	61,12	61,36	tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Balangan tahun 2009

Demikian juga halnya dengan prevalensi gizi buruk yang ada di Kabupaten Balangan. Perkembangan dari tahun 2005 sampai tahun 2009 menunjukkan trend yang stabil dan cenderung ke arah negatif, dalam artian bertambah meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.27, dimana pada tahun 2008, gizi buruk sebesar 0,01 persen dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,02 persen. Gizi kurang juga meningkat, dimana pada tahun 2008 sebesar 3,03 persen, meningkat menjadi 4,01 persen di tahun 2010.

Tabel 2.27. Data Perkembangan Gizi di Kabupaten Balangan

NO	Data Gizi	Tahun			KET.
		2008	2009	2010	
1	Gizi buruk	0,01	0,05	0,02	persen
2	Gizi Kurang	3,03	4,01	4,01	persen

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Balangan tahun 2010

Kenyataan ini perlu dicari solusi yang tepat, baik dalam tataran kebijakan, maupun implementasinya. Alokasi anggaran sebesar 15 persen dari total APBD untuk kesehatan perlu dibarengi dengan output dan outcome yang terarah dari setiap kegiatan.

Dalam rangka menerapkan sistem Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi penduduk Balangan, maka Jamkes yang sudah ada dilengkapi dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jumlah peserta Jamkesda sebanyak 3.785 jiwa. Dengan jumlah tersebut, cakupan Jamkesda sebanyak 17,9 persen dari total masyarakat miskin.

2.3.3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan pembangunan pada program ini selain melalui peningkatan jumlah prasarana juga dengan memperluas jumlah akseptor terhadap program KB telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran adalah tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB Baru di Kabupaten Balangan relatif merata di setiap kecamatan, terbanyak terdapat pada kecamatanTebing Tinggi yaitu sebanyak 1207 orang, kemudian Kecamatan Paringin Selatan sebanyak 834 orang sedangkan paling sedikit di Kecamatan Juai yang hanya 500 orang.

Gambar 2.9. Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2009

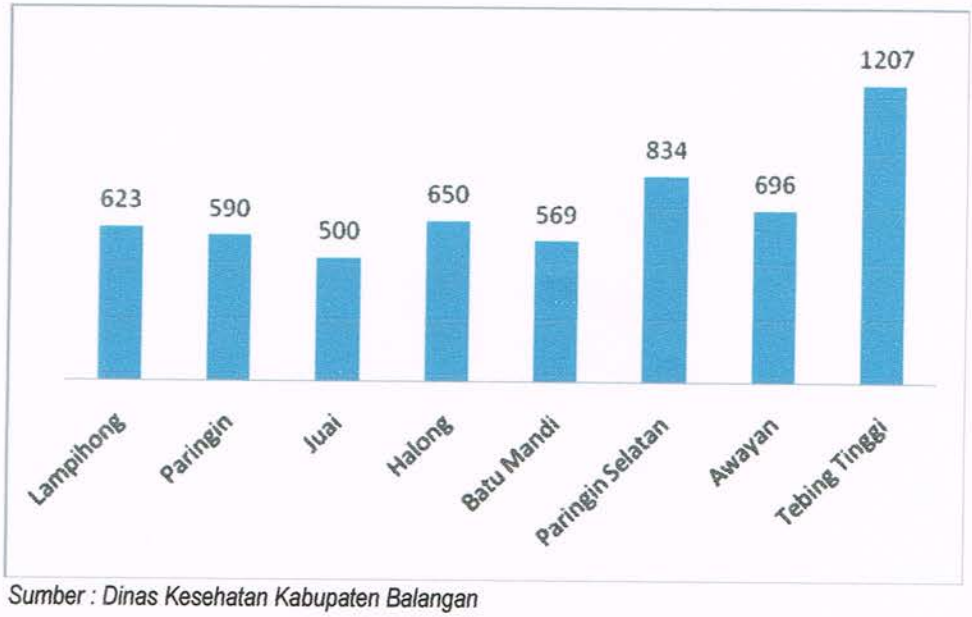

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Perhubungan

Aktivitas masyarakat sehari-hari memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah jalan sebagai sarana mobilitas daerah masyarakat dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Total panjang jalan di wilayah kabupaten Balangan mencapai 660,183 km dengan jenis permukaan Aspal sepanjang 427,624 Km, Kerikil sepanjang 212,045 Km. dan Tanah sepanjang 20,154 Km.

Gambar 2.10. Proporsi Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2009

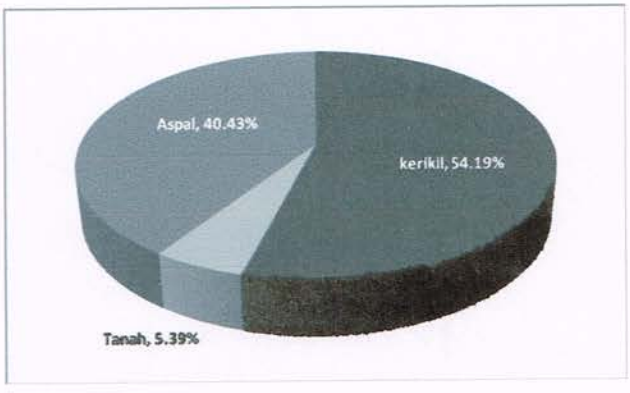

Sumber : BPS, Balangan dalam angka 2010

Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung transportasi darat. Diantaranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkar timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan dengan Gunung Pandau Kecamatan Paringin.

Tabel 2.28.
Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi
di Kabupaten Balangan Tahun 2009 (dalam buah)

Jenis	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak berat
Beton	5	4	1	-
Baja	11	8	2	1
Box Culvert	52	30	18	4
Kayun Ulin	375	84	211	80
Kayu	2	-	-	2
Total	445	126	232	87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan

Untuk memperlancar arus distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan, selain meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Meskipun luas terminal ini 6.240 m2, namun daya tampung terhadap jumlah penumpangnya cukup besar yaitu 1.100 orang dan bisa menampung 5 bus serta 40 non bus. Hal tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Terminal berdasarkan Kondisi di Kabupaten Balangan

Nama Terminal	Jarak dari Banjarnasin (km)	Luas (m2)	Daya Tampung			Status
			Bus	Non Bus	Orang	
Paringin	200	6,240	5	40	1100	AKAP,AKDP, TAP

Sumber : Buku Laporan Penyusunan Master Plan Tataran Transportasi Lokal (Tataralok) Kabupaten Balangan

2.4.2. Pos dan Telekomunikasi

Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan 1 buah Kantor Pos Kabupaten, 4 buah Kantor Pos Pembantu dan 3 buah rumah Pos. Kantor Pos berlokasi di Kecamatan Paringin sedangkan kantor pos pembantu tersedia di Kecamatan Lampihong, Juai, Batu Mandi dan Awayan sedangkan rumah pos berlokasi di Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat ini selain kantor pos, juga sudah tersedia fasilitas sambungan telepon (*fixed telephone)* dari Telkom beserta layanan jaringan dari PT. Telkomsel, Indosat, dan Exelindo. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini yang semakin tidak tergantung pada keberadaan telepon kabel, terbukti saat ini sudah semakin marak pembangunan tower-tower BTS.

Tabel 2.30.
Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kantor Pos	Kantor Pos Pembantu	Rumah Pos
Lampihong	-	1	-
Paringin	1	-	-
Juai	-	1	-
Halong	-	-	1
Batu Mandi	-	1	-
Paringin Selatan	-	-	1
Awayan	-	1	-
Tebing Tinggi	-	-	1
Jumlah	1	4	3

Sumber : PT. Pos Indonesia Amuntai

2.4.3. Air Minum

Dalam pemenuhan kebutuhan Air penduduk Kabupaten Balangan tercukupi dari air sumur, sungai dan PDAM. Air sungai merupakan sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Balangan terdapat dua sungai utama, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan sehingga debitnya sangat tergantung pada musim. Pada musim kemarau debit sungai kecil, sungai menjadi dangkal bahkan sampai terlihat dasar sungainya. Sebaliknya di musim hujan debit sungai itu menjadi besar, arusnya menjadi deras, dan air sungai menjadi sangat keruh akibat pengerosian dari tebing-tebing sungai. Tabel 2.30. dan 2.31. menunjukkan data air minum yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.31.
Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran

Kecamatan	IKK/IPA	Produksi (m^3)	Distribusi (m^3)	Terjual (m^3)	Susut/Hilang (m^3)
Lampihong	IKK	198,256	188,816	154,922	33,894
Paringin	IPA	961,648	913,565	692,902	220,663
Juai	IKK	158,537	150,988	122,234	28,754
Halong	IKK	79,605	75,624	59,283	16,341
Batu Mandi	IKK	144,953	136,954	111,932	25,022
Paringin Selatan	-	0	0	0	0
Awayan	IKK	84,920	80,674	67,013	13,661
Tebing Tinggi	-	0	0	0	0
Jumlah	-	1,627,918	1,546,621	1,208,286	338,335

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan

Tabel 2.32.
Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2003-2010
Tahun (Ltr/dtr)

No.	UNIT PDAM	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Paringin								
	a. Paringin I	5.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	b. Paringin II	-	-	10.0	20.0	30.0	30.0	80.0	80.0
	c. Paringin III	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
2.	Halong	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
3.	Juai	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.	Lampihong	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.	Batu Mandi	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6.	Awayan	2.5	2.5	2.5	2.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Jumlah		52.5	52.5	67.5	77.5	97.5	97.5	187.5	187.5

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan

2.4.4. Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2009 jumlah langganan listrik sudah mencapai 4.665 pelanggan. Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Barabai Wilayah Ranting Paringin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.33. berikut ini.

Tabel 2.32.
Banyaknya Sambungan Langgan Listrik Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2009

Kecamatan	Sambungan Aktif		Sambungan Tidak Aktif		Jumlah
	Langsung	Tdk. Lansung	Langsung	Tdk. Langsung	
Lampihong	536	31	6	-	573
Paringin	2,400	27	80	8	2,515
Juai	566	5	4	1	576
Halong	282	7	9	-	298
Batu Mandi	329	3	21	1	354
Paringin Selatan	-	-	-	-	-
Awayan	323	1	22	3	349
Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
Jumlah	4,436	74	142	13	4,665

Sumber : PT. PLN Ranting Paringin

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Tahun Anggaran (TA) 2004 volume APBD sejumlah Rp 92,498 Milyar, pada Tahun 2005 menjadi Rp 141,248 Milyar, TA. 2006 Rp 283,40 Milyar, TA. 2007 Rp 304.844 Milyar, TA. 2008 Rp 460,969 Milyar, TA.2009 Rp 464,121 Milyar dan Tahun 2010 Rp 525,649 Milyar.

Dari sisi volume terus meningkat, namun dari sisi analisa pendapatan Kabupaten Balangan belum mencerminkan APBD yang memiliki kemandirian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2004 hanya memiliki proporsi 1,5%, TA. 2005 bahkan turun menjadi 1,03%, TA. 2006 1,41%, TA. 2007 1,34%, TA. 2008 naik menjadi 2,12%, TA. 2009 3,52% dan TA. 2010 3,5%. Sebagian besar pendapatan didominasi oleh Dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

3.1.2. Neraca Daerah

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD.

Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007) memang dimungkinkan untuk menyatakan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca. Hal ini kurang tepat jika neraca dipandang dari konsep akuntansi, karena penilaian suatu aset haruslah sebesar nilai

perolehannya (konsep *full cost*). Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (*ready to use*) haruslah dihitung sebagai *cost* aset bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalah semua biaya yang menjadi masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, *cost* untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai *outcome*. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD, dalam hal ini, perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa; misalnya aset yang diterima dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat.

Dalam pengelolaan isu yang terkait dengan asset mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan, harus terus menerus mendapatkan perhatian dan perbaikan sehingga pengelolaan asset di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan baik. Rekapitulasi aset Kabupaten Balangan sampai dengan tahun anggaran 2009 disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2008-2010

No	Perolehan	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap lainnya (Rp)	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1	Tahun 2008	19,243,248,600	13,371,325,206	45,881,190,951	7,451,452,730	1,745,108,900	-
2	Tahun 2009	12,793,976,815	22,619,984,602	41,368,379,777	79,176,169,128	1,501,392,833	2,912,194,000
3	Tahun 2010 (per Oktober)	3,471,115,050	7,782,540,883	8,182,680,552	5,109,430,700	4,191,884,910	-

Sumber : Bidang Aset DPPKAD Kab Balangan

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 rata-rata rasio persentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran hanya sebesar 24.97% seperti dirinci pada tabel 3.2. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Balangan relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD.

Tabel 3.2.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Balangan Tahun 2008-2010

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) X 100 %
1	TA 2008	97,715,074,395	460,969,851,245	21,20
2	TA 2009	127,951,989,397	464,121,910,403	27,57
3	TA 2010	201,691,773,887	686,742,379,466	29,37

Sumber: Bidang Pembiayaan DPPKAD Kab Balangan

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2008 sampai 2010 ternyata defisit riil anggaran Kabupaten Balangan dapat ditutup dari SILPA Tahun anggaran sebelumnya. Hal ini tampak dari rata-rata proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil sebesar 112.9%, dengan SILPA selalu lebih besar dari total defisit riil. Sedangkan untuk proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil setiap Tahun Anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2008-2010

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)		
		2008	2009	2010
1	SILPA TA sebelumnya	113.63	114.74	117.39
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-

Sumber: Bidang Akuntansi DPPKAD Kab Balangan

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung selama tiga Tahun Anggaran terakhir ialah positif 20.09%. Dari berbagai komponen Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan rata-rata terbesar disumbangkan oleh Belanja Hibah yaitu positif 90.79%, sedangkan rata-rata pertumbuhan negatif dialami oleh Belanja Subsidi sebesar minus 5.56% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar minus 27.41%.

Untuk rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung selama tiga Tahun Anggaran terakhir mengalami pertumbuhan positif 16.74%, dengan pertumbuhan rata-rata terbesar dialami oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 22.77%. Kemudian untuk rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Pengeluaran selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif 63.19%. Pertumbuhan positif terbesar dialami oleh komponen Penyertaan Modal rata-rata 67.92%. Untuk lebih lengkapnya, data pengeluaran Kabupaten Balangan tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten BalanganTahun 2008-2010

No	Uraian	2008	2009	2010
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**141,939,955,195**	**167,695,327,047**	**258,936,175,487**
1	Belanja Pegawai	97,715,074,395	127,951,989,397	201,691,773,887
2	Belanja Subsidi	450,000,000	400,000,000	400,000,000
3	Belanja Hibah	9,468,000,000	7,702,500,000	23,125,000,000
4	Belanja BANSOS	12,440,000,000	9,860,000,000	6,500,000,000
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,000,000,000	10,000,000,000	13,359,700,800
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,666,880,800	11,205,880,800	13,359,700,800
7	Belanja Tidak Terduga	1,200,000,000	574,956,850	500,000,000
B	**Belanja Langsung**	**301,529,896,050**	**279,126,583,356**	**393,325,904,779**
1	Belanja Pegawai	20,041,911,615	14,573,003,500	24,634,595,000
2	Belanja Barang dan Jasa	70,035,276,601	79,402,835,694	104,949,489,321
3	Belanja Modal	211,452,707,834	185,150,744,162	263,741,820,458

No	Uraian	2008	2009	2010
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**17,500,000,000**	**17,300,000,000**	**39,360,000,000**
1	Penyertaan Modal PEMDA	5,300,000,000	5,300,000,000	12,500,000,000
2	Pembayaran Pokok Utang	12,200,000,000	12,000,000,000	26,860,000,000

Sumber : Bidang Pembiayaan & Akuntansi DPPKAD Kab Balangan

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk proyeksi lima tahun ke depan, berdasarkan *trend linier* beberapa tahun sebelumnya maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan akan terus meningkat dengan *trend* positif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Balangan memiliki potensi riil untuk lebih mandiri, asalkan dalam Pos Pendapatannya komposisi PAD lebih ditingkatkan daripada Dana Perimbangan karena menurut proyeksi *linier*, Pos Pendapatan APBD Kabupaten Balangan memiliki *trend* positif.

Tabel 3.5.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Balangan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Proyeksi				
		2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	550,000,000,000	660,000,000,000	792,000,000,000	950,400,000,000	1,140,480,000,000
2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0
3	SILPA Riil	134,920,325,447.92	134,461,596,341.39	134,004,426,913.83	133,548,811,862.20	133,094,745,901.99
Total Penerimaan		**684,920,325,448**	**794,461,596,341**	**926,004,426,914**	**1,083,948,811,862**	**1,273,574,745,902**
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama	540,186,382,787	676,241,727,094	857,090,971,389	1,102,778,517,432	1,444,357,317,937
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**144,733,942,661**	**118,219,869,247**	**68,913,455,525**	**(18,829,705,570)**	**(170,782,572,035)**

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Balangan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik

berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Balangan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2005-2010, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

1) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Meskipun capaian IPM Kabupaten Balangan menunjukkan tren meningkat namun dengan capaian IPM 65,60 pada tahun 2008. Menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia Menengah Bawah, yaitu capaian IPM di antara 50–65,9.
2) Masih banyak penduduk miskin yakni 7.316 KK atau 7,22 % dari total 30.577 KK yang ada di Kabupaten Balangan. Mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha, perumahan, air bersih, dan lain-lain) secara optimal.

3) Daya saing produk unggulan Kabupaten Balangan secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut.
4) Belum kondusifnya iklim investasi sehingga mengakibatkan investasi yang masuk ke daerah di luar sektor pertambangan dan penggalian masih rendah.
5) Terbatasnya akses masyarakat ke sumber permodalan, penguasaan iptek dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan pengairan dan jaringan jalan pada sentra-sentra produksi.
6) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, air bersih, transportasi serta pemukiman dan fasilitas umum) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
7) Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi serta belum optimalnya penerapan hukum yang menyangkut *illegal mining* dan *illegal logging*.
8) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja.
9) Masih lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang sigiifikan

terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

1) Peningkatan ketahanan kinerja PDRB terhadap pengaruh gejolak perekonomian regional, nasional dan global.
2) Perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi segenap potensi lokal.
3) Perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta
4) Penurunan jumlah penduduk miskin.
5) Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.
6) Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah
7) Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
8) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* dan mengedepankan *governance* di semua aspek.
9) Peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik
10) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Berdasarkan perhitungan PDRB tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan adalah sebesar 5,09% (tanpa minyak bumi dan pertambangan), sedangkan jika dihitung dengan minyak bumi dan pertambangan, pertumbuhan ekonomi Balangan sebesar 5,07%. Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan meningkat menjadi 5,72%. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan minyak bumi dan pertambangan pada tahun 2009 adalah 2.283 miliar rupiah, sedang jika tanpa minyak bumi dan pertambangan sebesar 855, 76 miliar rupiah yang meningkat dari tahun 2008 (750, 32 miliar rupiah).

Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2006- 2010 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Balangan yang sejahtera. Masih relatif banyak masyarakat Balangan yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi harus terus

menerus dilakukan yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Balangan (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Balangan dalam menghadapi berbagai goncangan.

Pengurangan jumlah kemiskinan tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur.

Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang tingkat kesehatan yang memadai. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas masyarakat Balangan menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Balangan dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia

secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah dalam lingkup administrasi pemerintahan Kabupaten Balangan.

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, kesadaran masyarakat Kabupaten Balangan untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan.

BAB V
VISI, MISI, DAN TUJUAN

5.1. Visi

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2010–2015, yaitu:

"MELANJUTKAN PEMBANGUNAN
MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA"

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MANDIRI:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang mandiri** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemandirian juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

5.2. Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2011–2015 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2011- 2015, yaitu:

I. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

II. Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah

III. Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan lokal

IV. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional

V. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
		Meningkatnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
		Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam

Misi	Tujuan	Sasaran
berwawasan lingkungan.		
Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih
		Tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan local	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan
		Meningkatnya mutu pendidikan dan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik
	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan professional	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
		Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi
Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan	Terciptanya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.	Menurunnya kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatnya penuntasan kejahatan (*clearance rate*)

Misi	Tujuan	Sasaran
masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.		

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

Misi I:

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan dan pengembangan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan	Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
			Mendorong berkembangnya investasi berbasis keunggulan daerah
			Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatkan realisasi investasi
			Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
			Meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan
			Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
	Meningkatnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah	Peningkatan akses usaha UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya Produktif	Melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dan menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin	Penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan	Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif
			Menumbuhkembangkan investasi, khususnya investasi padat pekerja agar tercipta kesempatan kerja
			Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
			Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
		Pemberdayaan masyarakat miskin	meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk memutus rantai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas SDM
			Memberdayakan sektor informal terutama UMKM serta Koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan kaum miskin
			Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Penciptaan ketahanan pangan *(food security)* secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan
			Meningkatkan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.
	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan	Mengendalikan dan memantau pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati;
			Memperbaiki kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
			Menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			Meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan penguatan kelembagaan;
			Menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara serta meningkatkan pemanfaatannya untuk kepentingan Daerah
			Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
			Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
			Meningkatkan penyediaan peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah
			Menata dan menegakkan hukum pertanahan, mengurangi potensi sengketa.

Misi II:

Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi	Peningkatan pelayanan transportasi yang memadai dan merata	Mengurangi kekurangan/ketertinggalan penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi
			Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu
			Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih	Peningkatan dan pelestarian keberlanjutan ketersediaan air	Meningkatkan dan melestarikan sumber-sumber air untuk menjaga kuantitas dan kualitas pasokan air
			Meningkatkan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan
			Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat
	Tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	Peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya
			Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan
			Meningkatkan aksesibilitasi masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai

Misi III:

Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan lokal:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dinamis, berdaya saing dan berkelanjutan.	Meningkatkan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat bagi seluruh masyarakat yang menjamin akses dan kualitas pelayanan
			Meningkatkan penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan
			Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan (*universal coverage*)
	Meningkatnya mutu pendidikan dan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan		Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan 20% lebih dari APBD Kabupaten Balangan
			Menyelenggarakan pendidikan dasar dua belas tahun bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi standar pelayanan minimal
			Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik		Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG
Meningkatkan kualitas kehidupan	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama
			Meningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
beragama	umat beragama		peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan
			Meningkatkan wawasan keagamaan yang toleran dan selaras dengan wawasan kebangsaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender, serta kebhinekaan
			Meningkatkan pengelolaan dan fungsi rumah ibadah serta kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya	Melestarikan, mengembangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya
			Meningkatkan penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya

Misi IV:

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan professional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penerapan tata kelola pemerintah yang baik pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah		Mengembangkan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi dalam proses kerja untuk meningkatkan kinerja birokrasi
			Meningkatkan kapasitas institusi dan aparatur pemerintahan desa
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi		Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dan aplikasi dasar *e-government*

Misi V:

Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.	Menurunnya kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatnya penuntasan kejahatan (*clearance rate*)	Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum	Melaksanakan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas, dalam rangka mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2011-2015, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:

a. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan**. Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti terciptanya lapangan kerja yang memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah, yang didukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, termasuk peningkatan investasi dan revitalisasi pertanian dalam arti luas, dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) serta perbaikan iklim ketenagakerjaan.
b. **Memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya** alam yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
c. **Membangun infrastruktur dan sarana-prasarana umum yang handal** yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur dan sarana-prasarana umum.
d. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayananan kesehatan berkualitas, pembangunan bidang agama dan sosial budaya, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
e. **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah** agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) , penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan

dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai

f. **Membangun kondisi kehidupan yang kondusif**. Kebijakan ini terkait dengan pengembangan kehidupan beragama yang kondusif, kehidupan sosial budaya dan pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban umum.

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Program pembangunan daerah lima tahun ke depan tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut:

a. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
b. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
c. Pembangunan Infrastruktur,
d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan,
a. Pembangunan Iklim Kehidupan yang Kondusif.

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana program prioritas diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program prioritas sesuai permasalahan pembangunan masing-masing. Indikasi program prioritas jelas menyebutkan SKPD penanggungjawab dan disertai pagu indikatifnya.

Indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan *terlampir*.

BAB IX
INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Suatu indikator kinerja pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang disusun berdasarkan misi sebagai berikut:.

VISI: **MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA**

Misi I:

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	5,72	6,19	6,42	6,66	6,89	7,13
		PDRB per kapita (Rp):						
		- *dengan tambang*	23.553.092	24.771.842	26.667.676	28.157.259	29.376.010	30.730.177
		- *tanpa tambang*	7.747.563	8.284.335	8.821.108	9.357.880	9.894.653	10.431.425
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%):						
		- *dengan tambang*	0,77	0,745	0,76	0,775	0,79	0,805
		- *tanpa tambang*	0,29	0,256	0,265	0,268	0,274	0,28
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%):						
		- *dengan tambang*	4,22	4,44	4,66	4,88	5,11	5,33
		- *tanpa tambang*	12,08	12,66	13,24	13,81	14,39	14,96
		Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	62,02	61,66	61,12	60,77	60,15	59,32
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%):						
		- *dengan tambang*	20,18	20,68	20,92	21,22	21,91	22,28
		- *tanpa tambang*	56,37	55,02	53,68	52,33	50,98	49,63

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (dlm ribuan)	1.344.103	1.594.103	1.844.103	2.094.103	2.344.103	2.594.103
	Meningkatnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah	Koperasi aktif (%)	48,80	50	55	60	65	70
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit usaha)	2.685	2.885	3.085	3.285	3.485	3.685
		Jumlah BPR		1	1	1	1	2
		LKM (unit usaha)	3	6	9	12	15	18
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,45	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20
		Penduduk miskin (%)	7,04	6,33	5,62	4,92	4,21	3,5
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/jiwa)	121,2	128.291	134.093	134.354	137.537	140.725
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha)	3,93	4,18	4,27	4,35	4,44	4,53
		Peningkatan produksi						

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
		perikanan (%)	101.415,4 (Kg)	55,55	142,26	277,3	487,9	816,7
		Peningkatan produksi peternakan (%):						
		- Daging	983.441 (kg)	6,59	18,80	21,67	30,56	40,50
		- Telur	658.080 (kg)	8,39	18,17	29,57	42,91	58,58
	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	2690	2960	3580	4250	5025	5790
		Cakupan Penanganan sampah (%)	55	59,50	61,70	64,00	66,25	68,50
		Pengendalian Tingkat Pencemaran (%	35	45	60	70	75	80
		Ketaatan terhadap RTRW (%)	0	5	10	15	35	55
		Luas wilayah produktif-*pertanian* (Ha)	31.000	32.668	32.678	32.688	32.698	33.008
		Luas wilayah produktif-*Kehutanan & Perkebunan* (Ha)	34.480	35.480	36.730	37.880	38.130	39.380
		Produksi karet (kg)	26.751	28.089	29.493	30.968	32.516	34.142
		Penurunan lahan kritis (%)	43.732,5	43.462,5	42.842,5	42.172,5	41.402,5	40.632,5

Misi II:

Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi	Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	55,62	59,72	66,57	72,86	79,16	85,45
		Jembatan dalam kondisi baik (%)	26,17	30,61	33,66	36,71	39,76	42,81
		Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya /pelebaran (km)	66,53	70,99	73,74	78,64	83,23	87,98
		Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km)	3	-	1	2	3	4
		Cakupan panjang jalan yang dipelihara (%)	66,28	70,15	75,42	80,7	85,97	91,24
		Panjang jembatan yang dibangun (m)	1.030	1.205	1.265	1.325	1.385	1.445
		Terminal dalam kondisi baik (%)	60	70	80	85	90	100
		Pembangunan terminal baru (%)	-	20	50	70	100	100
		Peningkatan Operasional Balai	70	75	80	85	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Pengujian Kendaraan bermotor (%)						
		Ketersediaan fasilitas penunjang lalu lintas (%)	50	60	70	80	90	100
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	30	40	50	60	70	80
		Panjang jaringan irigasi yang dibangun (m)	74.115,0	103.761,0	111.172,5	118.584,0	125.995,5	133.407,0
		Panjang talud/tanggul/JUT yang dibangun (m)	6.892	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000
		Panjang jalan inspeksi yang dibangun (m)	5.000	5.800	6.000	7.200	8.400	9.600
	Tersedianya prasarana dan sarana perumahan & permukiman, serta perkantoran	Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%)	30	40	45	50	55	60
		Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%)	20	25	30	35	40	45
		Jalan lingkungan yang dibangun (%)	20	30	35	40	45	50
		Gedung perkantoran yang dibangun (*dalam kondisi baik*)-%	40	45	50	55	60	65

Misi III:

Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan lokal:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup	67,9	68	68,5	69	69,5	70,1
		Menurunnya angka kematian ibu Melahirkan (per 100.000)	259	230	202	174	146	118
		Menurunnya angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran)	25	24	23	22	21	20
		Menurunnya prevalensi gizi kurang	4,1	4	3,5	3	2,5	2
		Menurunnya prevalensi gizi buruk) pada anak balita	0,02	0,01	0	0	0	0
		Jumlah Bidan (orang)	84	97	110	123	136	149
		Jumlah Poskesdes (unit)	88	98	108	118	128	138
		persentase penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat-PHBS)	36	42,8	49,6	56,4	63,2	70
	Meningkatnya mutu pendidikan dan aksessibilitas masyarakat	Angka melek huruf	94,91	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
		Angka rata-rata lama sekolah:						
		- SD	6,23	6,22	6,21	6,20	6,19	6,18
		- SMP	2,95	2,96	2,97	2,98	2,98	3,00
		- SMA/SMK	3,03	3,02	3,01	3,00	3,00	3,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	terhadap pelayanan pendidikan	APK PAUD	36,38	38,50	40,00	42,00	45,00	50,00
		APK TK sederajat	44,14	50,50	51,00	52,00	55,00	60,00
		APK SD/sederajat	81,05	89,82	93,05	96,40	99,88	100
		APK SMP/Mts	85,28	86,83	89,33	91,89	96,55	98,50
		APK SMA/SMK/MA	50,12	61,04	64,97	69,24	73,88	75,50
		APM SD/sederajat	64,25	77,10	80,85	85,49	95,50	100,00
		APM SMP/sederajat	64,52	77,50	80,90	85,90	95,50	100,00
		APM SMA/SMK/sederajat	50,12	55,00	60,00	65,00	65,50	70,00
		Angka Kelulusan SD sederajat	87,00	88,00	89,00	90,00	90,50	90,50
		Angka Kelulusan SMP sederajat	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00
		Angka Kelulusan SMA/SMK sederajat	93,00	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):						

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
		- TK	20	20	40	50	100	100
		- SD	30	50	65	85	100	100
		- SMP	50	60	70	85	100	100
		- SMA/SMK	70	80	90	100	100	100
	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik	Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	75	80	80	85	90	90
		Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kehamilan/cakupan K4 (%)	54,78	80	80	85	90	95
		Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	77,99	80	85	90	95	100
		Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	82,29	85	88	90	95	100
		Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	90,49	92	93	95	97	100
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun	Jumlah konflik bernuansa agama	0	0	0	0	0	0
		Rasio sarana ibadah (per 10.000 penduduk)	3,99	3,99	4,00	4,01	4,01	4,02

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	dan damai di kalangan umat beragama							
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Jumlah group kesenian	5	6	8	9	11	14
		Jumlah peristiwa budaya	2	3	4	5	6	7
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	3	4	6	7	8

Misi IV:

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif (%)	-	-	25	50	75	100
		Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100
		Temuan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100
		Jumlah LHP	72	128	128	128	128	128
		Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)-%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik	-	-	2	2	2	2
		Jenis pelayanan yang dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	-	2	2	2	2	2
	Meningkatnya kapasitas	SKPD yang telah memiliki dan menerapkan SOP	6	10	10	10	38	38

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan persyaratan jabatan dan pemenuhan kebutuhan profesionalitas (%)	73	73	87	94	96	98
		Aparatur bidang jasa konstruksi yang kompeten (%)	30	40	50	60	70	80
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK (%)	-	-	25	50	75	100
		Penyediaan jaringan TIK (%)	0	20	40	60	80	100

Misi V:

Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
Terciptanya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.	Menurunnya kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatnya penuntasan kejahatan (*clearance rate*)	Tindak kriminalitas yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian pelanggaran hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku (%)	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Polisi Pamong Praja (personil)	62	62	70	80	90	100
		Jumlah Linmas per desa (orang)	7	7	7	7	7	7

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Balangan dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 (sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 mendatang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, maka dalam masa transisi tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sesuai dengan jadwal dan agenda yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum seluruhnya rampung sampai akhir tahun 2015 dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2016.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan langsung tahun Tahun 2014 tetap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 yang sudah disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2011- 2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan telah dilantik pada tanggal 13 Agustus 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 selanjutnya juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). .

Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a) SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-progam dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
b) SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
c) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
d) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2011–2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dan dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat.

Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan.

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Indikasi Program Prioritas

Visi : **" MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA ".**

Misi I : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta

Dalam ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	1400KK	700.000	2600KK	1.300.000	2800KK	1.400.000	3000KK	1.500.000	4000KK	2.000.000	DISHUTBUN
Rehabilitasi hutan dan lahan	Penutupan lahan kritis	270 Ha	1.600.000	620Ha	2.750.000	670 Ha	3.750.000	770 Ha	2.750.000	770 Ha	2.750.000	DISHUTBUN
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pengendalian kerusakan hutan dan Lahan	7,25%	725.000	8%	800.000	8%	800.000	8%	800.000	6,5%	650.000	DISHUTBUN
Peningkatan kesejehteraan petani	Peningkatan status lahan petani	200 persil	100.000	200 persil	100.000	200 persil	100.000	200 persil	100.000	200 persil	100.000	DISHUTBUN
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Perbaikan mutu produk olah perkebunan	34 kelompok	2.250.000	38 kelompok	2.710.000	39 kelompok	2.810.000	38 kelompok	2.710.000	36 Kelompok	2.570.000	DISHUTBUN
Peningkatan penerapan teknonologi	Peningkatan SDM Petani	868 KK	532.000	795KK	327.000	845 KK	677.000	795 KK	327.000	795 KK	327.000	DISHUTBUN
Peningkatan produksi pertanian/	Peningkatan hasil perkebunan	1.873 Ha	6.475.000	2.122 Ha	7.600.000	2120 Ha	7.400.000	2120 Ha	7.400.000	2120 Ha	7.400.000	DISHUTBUN
Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya Produk IKM melalui Pembinaan	15%	43.308	20%	80.000	20%	120.000	20%	150.000	20%	250.000	DISPERINDAG KOP
Pengembangan Industri kecil dan menengah	Meningkatnya Pertumbuhan pengusaha industri	20%	158.562	20%	200.000	15%	250.000	20%	300.000	20%	350.000	DISPERINDAG KOP
Peningkatan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya skill pengguna mesin teknologi industri melalui pelatihan dan pendidikan	15%	137.549	20%	150.000	15%	170.000	20%	250.000	20%	270.000	DISPERINDAG KOP
Program penataan struktur industri	tersusunnya kebijakan kerjasama kemitraan BUMN dan swasta	20%	32.155	20%	70.000	20%	100.000	20%	150.000	15%	200.000	DISPERINDAG KOP
program pengembangan sentra-sentra industri	Terbentuknya sentra industri dan pembinaan kelompok industri	18%	32.599	15%	50.000	15%	100.000	20%	150.000	15%	275.000	DISPERINDAG KOP
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	15%	200.215	25%	250.269	25%	312.836	25%	391.045	25%	488.806	DISPERINDAG KOP
Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya informasi potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah terkait investasi	15%	29.785	25%	37.231	25%	46.539	25%	58.174	25%	72.718	DISPERINDAG KOP
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya kawasan peredaran barang dan jasa	20%	57.984	20%	60.000	20%	80.000	20%	100.000	20%	120.000	DISPERINDAG KOP
Peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatnya investasi produk unggulan daerah	15%	362.016	20%	400.000	20%	450.000	20%	475.000	25%	500.000	DISPERINDAG KOP
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	meningkatnya pertumbuhan kelompok koperasi produktif sebanyak 30 buah selama 5 tahun serta	15%	432.600	20%	519.120	20%	622.944	20%	747.533	25%	897.039	DISPERINDAG KOP

Dalam ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi Usaha Kecil	Meningkatnya data profil UKM yang berdaya saing dan kompetitif sebanyak 1000 UKM (2010-2015)	15%	398.450	20%	478.140	20%	573.768	20%	688.522	25%	826.226	DISPERINDAG KOP
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan di masyarakat		92.102		99.000		105.500		111.750		119.250	KKPPP
Program Ketersediaan Pangan Pertanian/Perkebunan	Tersedianya cadangan pangan daerah		98.764		108.500		116.500		126.750		135.250	KKPPP
Program Diversifikasi Pangan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola pangan AB3		115.869		120.250		126.000		130.500		136.500	KKPPP
Peningkatan kesejahteraan Petani	Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani		217.274		220.500		225.500		230.500		236.000	KKPPP
Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna		57.041		60.000		62.500		65.000		68.000	KKPPP
Peningkatan Kejetahteraan Petani	Meningkatnya produksi melalui Pemberdayaan Potensi yang dimiliki	20%	1.024.527	20%	1.126.980	20%	1.239.678	20%	1.363.646	20%	1.500.010	DINAS PERTANIAN, TP & H
Peningkatan ketahanan Pangan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah\ pertanian dan holtikultura		1.617.878		1.779.666		1.957.633		2.153.396		2.368.735	DINAS PERTANIAN, TP & H
Peningkatan Produksi pertanian dan	Meningkatnya produksitivita dan nilai tambah pertanian dan Perkebunan	100%	330.000	100%	363.000	100%	399.300	100%	439.230	100%	483.153	DINAS PERTANIAN, TP & H
Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya hasil pertanian tanaman pangan	5%	1.334.313	10%	1.467.744	15%	1.614.518	20%	1.775.970	25%	1.953.567	DINAS PERTANIAN, TP & H
Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	100%	288.324	100%	317.157	100%	348.872	100%	383.759.377	100%	422.135	DINAS PERTANIAN, TP & H
	Meningkatnya produktivitas pertanian/perkebunan	100%	288.323	100%	317.155	100%	348.871	100%	383.758	100%	422.134	DINAS PERTANIAN, TP & H
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terhindarnya ternak dan masyarakat dari penyakit menular ternak		348.653		383.518		421.870		464.057		510.463	DINAS PERTANIAN, TP & H
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatkan produktivitas ternak		2.563.355		2.819.690		3.101.659		3.411.825		3.753.008	DINAS PERTANIAN, TP & H
Peningkatan penerapan teknologi Peternakan	meningkatnya produktivitas peternakan		145.000		159.500		175.450		192.995		212.295	DINAS PERTANIAN, TP & H
Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertumbuhan Sektor Perikanan Budidaya	90%	1.055.559	90%	1.161.114	90%	1.277.226	90%	1.404.948	90%	1.545.443	DINAS PERTANIAN, TP & H
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Terakomodasinya pemasaran dan kebutuhan akan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan yang ASUH		1.815.000		1.996.500		2.196.150		2.416		26.573	DINAS PERTANIAN, TP & H
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan		615.545		564.715		810.000		609.715		498.715	BLHK

Dalam ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Peningkatan Peran serta dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan	Tingkat Kebersihan dan kesadaran masyarakat thd pengelolaan sampah mandiri		1.244.200		2.612.778		1.588.432		1.338.663		740.400	BLHK
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan aktivitas masyarakat dlm perannya menjaga kesejukan lingkungan		5.993		1.888.000		653.000		782.800		1.430.080	BLHK
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penurunan kasus-kasus trauma		428.805									DINSOSDUKNAKERTRANS
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang	Penurunan jumlah PMKS dan peningkatan taraf hidup KAT		465.142									DINSOSDUKNAKERTRANS
Program Pengembangan wilayah transmigrasi	Peningkatan kerjasama antar wilayah		170.000									DINSOSDUKNAKERTRANS
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Fasilitas Balai latihan dan tersedianya tenaga kerja terampil		332.740									DINSOSDUKNAKERTRANS
Program Penataan Administrasi Kependudukan	tertatanya administrasi kependudukan		558.440									DINSOSDUKNAKERTRANS
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksanannya diseminasi informasi melalui penyelenggaraan lomba desa		262.968		290.501		311.751		331.401		349.650	BPMPKB
Program Pembangunan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan		13.160		21.500		24.701		19.000		23.540	BPMPKB
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terbentuknya P2TP2A		140.337		148.000		153.000		157.000		165.000	BPMPKB
Pengingkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Mengikatnya peranan wanita menuju keluarga sejahtera dan Terbentuknya Desa Perempuan		135.149		140.000		144.000		150.000		160.000	BPMPKB
Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengusahaan tambang											DISTAMBEN
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mweusak	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan tambang											DISTAMBEN
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan	Cakupan wilayah yang teraliri daya listrik											DISTAMBEN

Dalam ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan	Terbangunnya terminal dan beroperasinya Balai Pengujian Kendaraan bermotor	56%		70%		85%		85%		90%		Dinas Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya serta fasilitasi penerbitan izin trayek	-		15%		32%		50%		65%		Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengawasan jasa komunikasi dan transportasi	40%		50%		60%		70%		80%		Dinas Perhubungan

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

...ikasi Program Prioritas

Visi : **" MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA ".**

Misi II : Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah

Dalam Ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pembangungan jalan dan jembatan	jalan dan jembatan dibangun	14 km 175 m	25.000.000	27 km 60 m	26.250.000	27 km 60 m	27.563	27 km 60 m	28.941	27 km 60 m	30.387.656	Dinas PU
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	jalan dan jembatan dalam kondisi baik	22 km 20 m	8.500.000	30 km 50 m	8.925.000	30 km 50 m	9.371.250	30 km 50 m	9.839.812	30 km 50 m	10.331.804	Dinas PU
Program penyediaan dan pengelolaan air baku	jumlah air tanah yang dibangun	2 unit	590.446	2 unit	619.966	2 unit	650.967	2 unit	683.515	2 unit	717.691	Dinas PU
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	cakupan pelayanan air bersih	40%	12.217.380	45%	12.828.249	50%	13.469.661	55%	14.143.144	60%	14.850.302	Dinas PU
Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	infrastruktur yang tersedia	40%	5.533.170	45%	5.809.828	50%	6.100.320	55%	6.405.336	60%	6.725.602	Dinas PU
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	sarana dan prasarana kebinamargaan yg tersedia	45%	4.190.000	46%	220.000	47%	240.000	48%	260.000	55%	1.835.000	Dinas PU
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	memperlancar aliran arus air	15 paket	6.338.512	15 paket	6.338.512	15 paket	6.338.512	15 paket	6.338.512	15 paket	6.338.512	Dinas PU
rehabilitasi/pemeliharaan talud/Bronjong	memperlancar aliran arus air	5 paket	628.300	5 paket	628.300	5 paket	628.300	5 paket	628.300	5 paket	628.300	Dinas PU
Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	mempermudah akses jalan petani	17 paket	4.523.000	17 paket	4.523.000	17 paket	4.523.000	17 paket	4.523.000	17 paket	4.523.000	Dinas PU
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	memperlancar aliran arus air	12 paket	6.272.632	12 paket	6.272.632	12 paket	6.272.632	12 paket	6.272.632	12 paket	6.272.632	Dinas PU

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Ket :
**menyesuaikan*

DALAM RIBUAN

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahunan	Usulan rencana pembangunan daerah		85.715		87.000		89.000		90.000		92.000	Bappeda
Penetapan RKPD Tahunan	Peraturan Bupati tentang RKPD Tahunan		16.741		17.000		18.000		20.000		25.000	Bappeda
Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah	Pembangunan ekonomi		221.844		495.000		515.000		530.000		555.000	Bappeda
Kootrdinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Pembangunan terpadu dan komprehensif		112.501								90.000	Bappeda
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Rujukan pembangunan kewilayahan											Bappeda
Koordinasi Permasalahan Transportasi perkotaan	Penurunan jumlah permasalahan transportasi perkotaan		119.870		131.857		145.042		159.547		175.501	Bappeda
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pertumbuhan wilayah strategis		448.400		493.240		542.564		596.820		656.502	Bappeda
Koordinasi Perencanaan Pembangunan sosial budaya	Keterpaduan pembangunan sosial dan budaya		403.560		740.000		585.000		560.000		790.000	Bappeda
Penyusunan Profil Daerah	Data Rujukan pembangunan daerah		111.946		117.548		123.425		129.596		136.076	Bappeda

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Indikasi Program Prioritas

Visi : **" MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA ".**

Misi III : Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan lokal

Dalam Ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM RS		263.080		289.388		318.327		350.159		385.175	RSUD
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya media informasi		-		7.000		7.700		8.470		9.317	RSUD
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		17.525.437		19.277.981		21.205.779		23.326.357		25.658.992	RSUD
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya pelayana Rumah Sakit berstandar		-		110.000		110.000		-		-	RSUD
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan	Menurunnya kematian ibu melahirkan		-		2.000		2.200		2.420		2.662	RSUD
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan minat baca dan kunjungan perpustakaan		363.514		447.000		474.000		1.415.000		588.000	Kantor Perpustakaan, Dok & arsip daerah
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tersedianya informasi yang aksesibel dan lengkap		22.025		40.500		40.500		40.500		40.500	Kantor Perpustakaan, Dok & arsip daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan kinerja organisasi		424.203		310.000		240.000		240.000		240.000	Kantor Perpustakaan, Dok & arsip daerah
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan		813.600		894.960		984.456		1.082.902		1.191.192	Dinas Kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kes		234.762		258.238		284.061		312.468		343.714	Dinas Kesehatan
Program obat dan perbekalan kesehatan	Ketersediaan obat dan kelengkapan kesehatan		765.394		841.934		926.127		1.019		1.121	Dinas Kesehatan
Program perbaikan gizi masyarakat	Tingkat kesehatan balita		727.070		799.777		879.754		967.730		1.065	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Tingkat pelayanan ibu hamil dan melahirkan		473.824		512.207		573.328		630.660		693.726	Dinas Kesehatan

Dalam Ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Menurunnya angka penderita penyakit menular		969.078		1.065.985		1.172.584		1.289.842		1.418.827	Dinas Kesehatan
Program peningkaitan derajat kesehatan dan mutu kehidupan usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang terlayani kebutuhan kesehatan		547.754		602.530		662.783		729.061		801.967	Dinas Kesehatan
Program upaya kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat											Dinas Kesehatan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Jumlah peserta dan kecakapan anak usia pra sekolah		222.380		244.618		269.080		295.988		325.587	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Dasar	Menurunnya angka mengulang pada jenjang pendidikan dasar		26.180.720		29.296.192		32.225.811		35.448.392		38.993.232	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah	Menurunnya angka mengulang pada jenjang pendidikan menengah		10.371.164		11.408.280		12.549.108		13.804.019		15.184.421	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Luar Sekolah	Meningkatnya warga usia sekolah dalam memiliki prestasi non akademis		1.319.777		1.451.755		1.596.930		1.756.623		1.932.286	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan (%)		2.719.539		2.991.493		3.290.643		3.619.707		3.981.678	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda	Peningkatan Dasar Keterampilan Pemuda, peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi pelajar	100%	13.935	100%	15.310	100%	16.851	100%	14.892	100%	20.086	Disporaparbud
Program Peningkatan Peran Serta Kepemu	Penguasaan Keterampilan dan kreativitas pemuda / pelajar termasuk penguasaan kemampuan baris berbaris serta memiliki kesadaran terhada[nilai-nilai perjuangan	100%	54.401	100%	88.895	100%	108.517	100%	127.348	100%	145.975	Disporaparbud
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	Penguasaan pemuda/pelajar terhadap Keterampilan dan menyalurkannya											Disporaparbud
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	Meningkatnya fasilitas dan minat olahraga serta menumbuhkan bibit atlet yang berprestasi	100%	102.950	100%	152.950	100%	202.450	100%	257.950	100%	307.950	Disporaparbud

Indikasi Program Prioritas

Visi : **" MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA ".**

Misi IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

DALAM RIBUAN

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan pelayanan	2 kegiatan	1.977.878	2 kegiatan	2.175.666	2 kegiatan	2.393.232	2 kegiatan	2.632.556	2 kegiatan	2.895.811	BKD
Program Pendidikan Kedinasan	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural	1 kegiatan	1.088.985	1 kegiatan	1.197.884	1 kegiatan	1.317.672	1 kegiatan	1.449.439	1 kegiatan	1.594.383	BKD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam	1 kegiatan	62.100	1 kegiatan	71.415	1 kegiatan	82.127	1 kegiatan	94.446	1 kegiatan	108.613	BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kinerja dan profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan	8 kegiatan	830.588	9 kegiatan	913.647	9 kegiatan	1.005.011	9 kegiatan	1.105.513	9 kegiatan	1.216.064	BKD

DALAM RIBUAN

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan SDM Aparatur	20 org	85.000	20 org	93.000	20 org	95.000	20 org	100.000	20 org	110.000	INSPEKTORAT
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pemeriksaan Rutin, Kasus, Tindak Lanjut LHP	128 LHP	4.345.710	128 LHP	5.110.426	128 LHP	5.186	128 LHP	5.799.013	128 LHP	5.744.016	INSPEKTORAT
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terciptanya Tenaga Pemeriksa yang Handal	10 org	375.000	15 org	470.000	15 org	515.000	15 org	565.000	15 org	675.000	INSPEKTORAT
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana/prasarana aparatur untuk meningkatkan pelayanan	90	284.064	95	417.945	97	346.595	98	347.245	100	380.745	KP2T
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD		5.600		6.060		6.475		6.630		6.900	SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		299.600		328.000		336.000		364.000		380.000	Kecamatan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat kemandirian masyarakat dalam perekonomian desa	20%	113.136	40%	113.136	60%	113.136	80%	113.136	100%	113.136	Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan kapasitas pelayanan publik											
Pengembangan Kecamatan	Implemtasi SPM											

Dalam Ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran	Berfungsinya sarana dan prasarana olahraga dengan baik	100%	102.950	100%	152.950	100%	202.450	100%	257.950	100%	307.950	Disporaparbud
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Menambah wawasan duta wisata dan dikenalnya objek wisata serta mampu mendukung PAD	100%	115.650	100%	144.500	100%	162.500	100%	182.000	100%	202.000	Disporaparbud
Program Pengembangan Destinasi Pariwisa	Terwujudnya objek wisata unggulan	100%	77.700	100%	242.000	100%	303.000	100%	365.000	100%	430.000	Disporaparbud
Program Pengembangan Kemitraan Pariwis	Menambah wawasan masyarakat terhadap pariwisata dan lestarinya wisata kuliner di kabupaten Balangan	100%	21.650	100%	60.000	100%	67.000	100%	74.000	100%	81.000	Disporaparbud
Program Pengembangan Nilai Budaya	Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap kebudayaan daerah	100%	-	100%	85.000	100%	95.000	100%	110.000	100%	1.250.000	Disporaparbud
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tersedianya data sejarah kabupaten Balangan dan menambah wawasan bidang model untuk NAGA	100%	128.595	100%	165.000	100%	206.000	100%	243.000	100%	280.000	Disporaparbud
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatanya pengetahuan di bidang seni tradisional dan modern	100%	136.385	100%	172.623	100%	208.457	100%	244.324	100%	285.597	Disporaparbud

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Indikasi Program Prioritas

Visi : " MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA ".

Misi V : Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Dalam Ribuan

Program	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										SKPD
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Berkurangnya penyakit masyarakat	100%	22.204	100%	25.534	100%	29.364	100%	33.769	100%	38.834	BNK
	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba	100%	95.144	100%	109.416	100%	125.828	100%	144.702	100%	166.408	BNK
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba	100%	70.850	100%	81.478	100%	93.700	100%	107.755	100%	123.918	BNK
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terkendalinya keamanan lingkungan	100%	425.425	100%	246.647	100%	352.512	100%	296.443	100%	328.287	SATPOL PP
	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba	100%	120.000	100%	132.000	100%	145.200	100%	159.720	100%	175.692	SATPOL PP
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat											Kelurahan Paringin Kota
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kenyamanan di masyarakat											Kelurahan Paringin Kota
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan											Kelurahan Paringin Kota
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah yang berdasar pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel	20%	7.887.000	20%	8.336.000	20%	8.737.000	20%	9.142.000	20%	9.550.000	DPPKAD

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE